



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH INTERGOVERNMENTAL TRANSFER
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL**

TESIS

TUTI ERMAWATI

0706179185

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI
DEPOK
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tuti Ermawati

NPM : 0706179185

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tuti Ermawati
NPM : 0706179185
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : Analisis Pengaruh *Intergovernmental Transfer* Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia
Pada Era Desentralisasi Fiskal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ari Kuncoro

Ketua Penguji : Dr. Arindra A.Zainal

Anggota Penguji : Dr. Diah Widyawati

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 26 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji syukur saya panjatkan kepada-Nya, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan rasa tulus dan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Ari Kuncoro, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr. Arindra A. Zainal, selaku ketua Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
- (3) Prof. Dr. Nachrowi D. Nahrowi, selaku sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan ketua dewan penguji yang telah memberikan pengetahuan serta ilmunya guna kesempurnaan dan selesainya tesis ini;
- (4) Dr. Diah Widyawati, selaku anggota dewan penguji yang telah memberikan pengetahuan serta ilmunya guna kesempurnaan dan selesainya tesis ini;
- (5) Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, terima kasih atas kesediaan membagi ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan, beserta staf dan karyawan PPIE UI (mbak Maya, Mirna, Yati, Denti, Ria dan Pak Wasdi);
- (6) Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menempuh perkuliahan di PPIE FE UI, beserta pimpinan dan staf yang telah banyak membantu penulis selama ini terutama kepada Prof. Jusmaliani, Dr. Wijaya Adi, Drs. Mahmud Thoha, MA, APU, Esta Lestari Mec;

- (7) Orang tua penulis terutama Ibu, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, terutama iringan doanya, belum banyak yang dapat penulis berikan untuk membalas kasih sayang mereka;
- (8) Suamiku, Rudy Fajar K, ST., atas segala pengorbanan dan doanya selama ini, semoga kita selalu dapat menggapai cinta Nya.
- (9) Anakku tercinta, Aika Naurah F serta calon adiknya yang masih dalam kandungan, yang telah banyak berkorban akan waktu yang tersita, terima kasih pelita ku.
- (10) Teman-teman angkatan 2007 PPIE, terutama Mas Rois, Mas Sri, Mas Bobby, Fani, Dian, Kumara, Raymond, Anis, Mbak Dwini, Monang, Mas Agung, Mbak Nora, Mas Ari, dan lainnya, terima kasih atas kebersamaannya dalam diskusi dan belajar bersama selama ini;
- (11) Bapak Sanjoyo, Pak Amir, mas Abdi Rizal, mbak Upi dan Ilwa, selaku asisten dosen, terima kasih atas bantuannya selama ini;
- (12) Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;

Akhir kata, saya berharap semoga Allah Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 26 Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik, Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Ermawati
NPM : 0706179185
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Pengaruh *Intergovernmental Transfer* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia Pada Era Desentralisasi Fiskal ”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juni 2009
Yang menyatakan



(.....)

Tuti Ermawati

ABSTRAK

Nama : Tuti Ermawati
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Judul : Analisis Pengaruh Intergovernmental Transfer Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia Pada
Era Desentralisasi Fiskal

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari *Intergovernmental transfer* khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Selain dipengaruhi oleh DAU dan DAK, pertumbuhan ekonomi kab/kota diengaruhi juga oleh pendapatan asli daerah (PAD) karena pada era desentralisasi fiskal daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengumpulkan pajak dan retribusi, serta dikontrol pula dengan variabel jumlah penduduk, investasi, indeks daya saing usaha daerah dan dummy wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) maupun yang tidak memiliki SDA.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dengan model *random effect* untuk 337 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003-2007 pada model 1 dan 131 kabupaten/kota pada tahun 2003-2005 untuk model 2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan ini sesuai dengan hipotesis, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh terhadap investasi.

Hasil estimasi terhadap variabel kontrol investasi menunjukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel indeks daya saing usaha, jumlah penduduk dan dummy wilayah SDA tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia.

Kata Kunci: *Intergovernmental transfer*, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal

ABSTRACT

Name : Tuti Ermawati
Study Program : Master in Economics
Title : Impact of Intergovernmental Transfer on Districts Growth in
Indonesia during the Era of Fiscal Decentralization

The objective of the study is to seek the impact if intergovernmental transfer especially the general fund allocation (DAU) and targetted fund allocation (DAK) on the districts economic growth in Indonesia during the era of fiscal decentralization. Apart from the impact of these transfers, districts/local economic growth is also affected by regional income (PAD) since during fiscal decentralization era, districts have authorities to collect tax and retribution. Moreover, districts growth are also controlled by other variabels of population, investment, competitiveness index and dummy variables of either rich or poor natural resources.

The study employs panel data with random effect models which distinguished into three models. Model 1 uses data of 337 districts in Indonesia from 2003 to 2007, model 2 and 3 use data of 131 districts for the year of 2003 to 2005. The result of the study proved the hypothesis that targetted fund allocation and regional income positively affect districts economic growth. Meanwhile, general fund allocation does not affect economic growth but do have effect on investment.

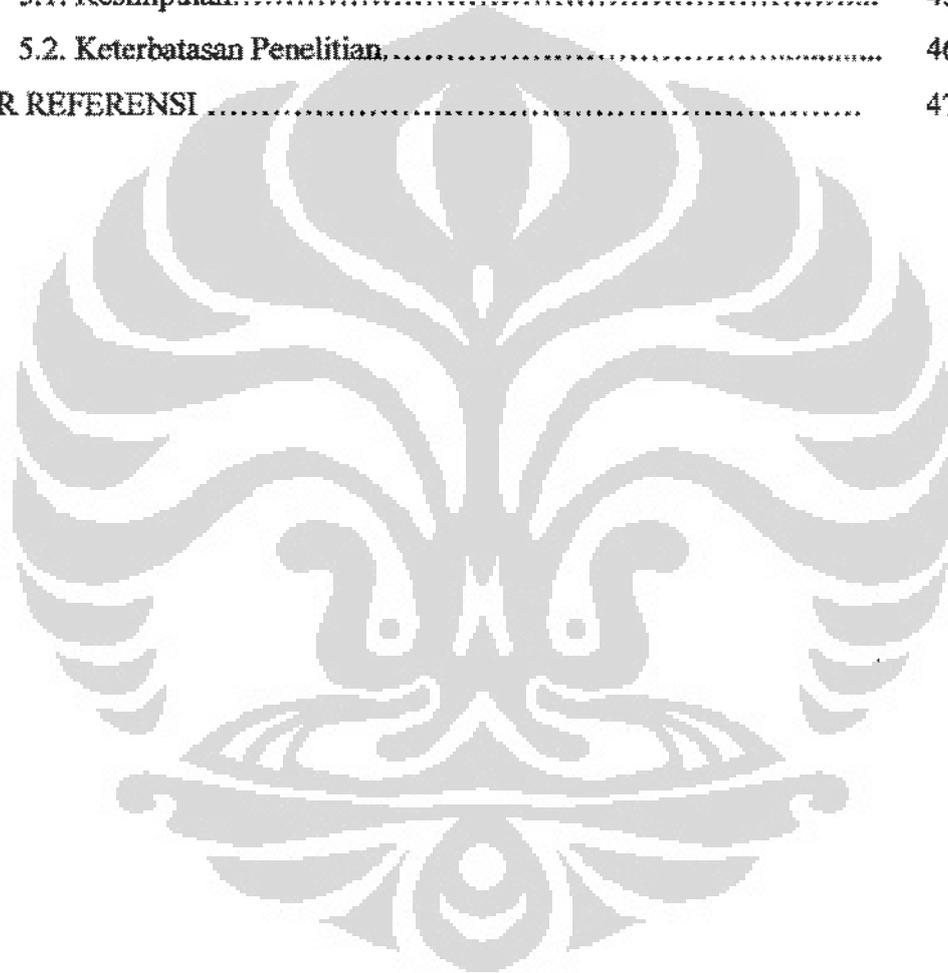
Estimation result shows that control variabels of investment shows positive relationship on economic growth. Meanwhile competitiveness index, population and dummy variables of natural resources have not significant impact on districts economic growth in Indonesia.

Keywords: Intergovernmental transfer, General fund allocation, Targetted fund allocation, Economic growth, Fiscal decentralization.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Hipotesis Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penyajian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. <i>Intergovernmental Transfer</i>	5
2.1.1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).....	7
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Eksogen.....	11
2.3 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	14
BAB III KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL.....	17
3.1. Perekonomian Kabupaten/Kota di Indonesia.....	17
3.1.1. Perekonian Kabupaten/Kota Berdasarkan Sumber Daya Alam (SDA) yang Dimiliki.....	20

BAB IV	METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS	24
4.1.	Spesifikasi Model	24
4.2.	Data dan Variabel.....	25
4.3.	Metode Estimasi Model.....	34
4.4.	Analisis Hasil Regresi.....	37
4.4.	Analisis Ekonomi.....	41
BAB V	KESIMPULAN	45
5.1.	Kesimpulan.....	45
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	46
DAFTAR	REFERENSI	47

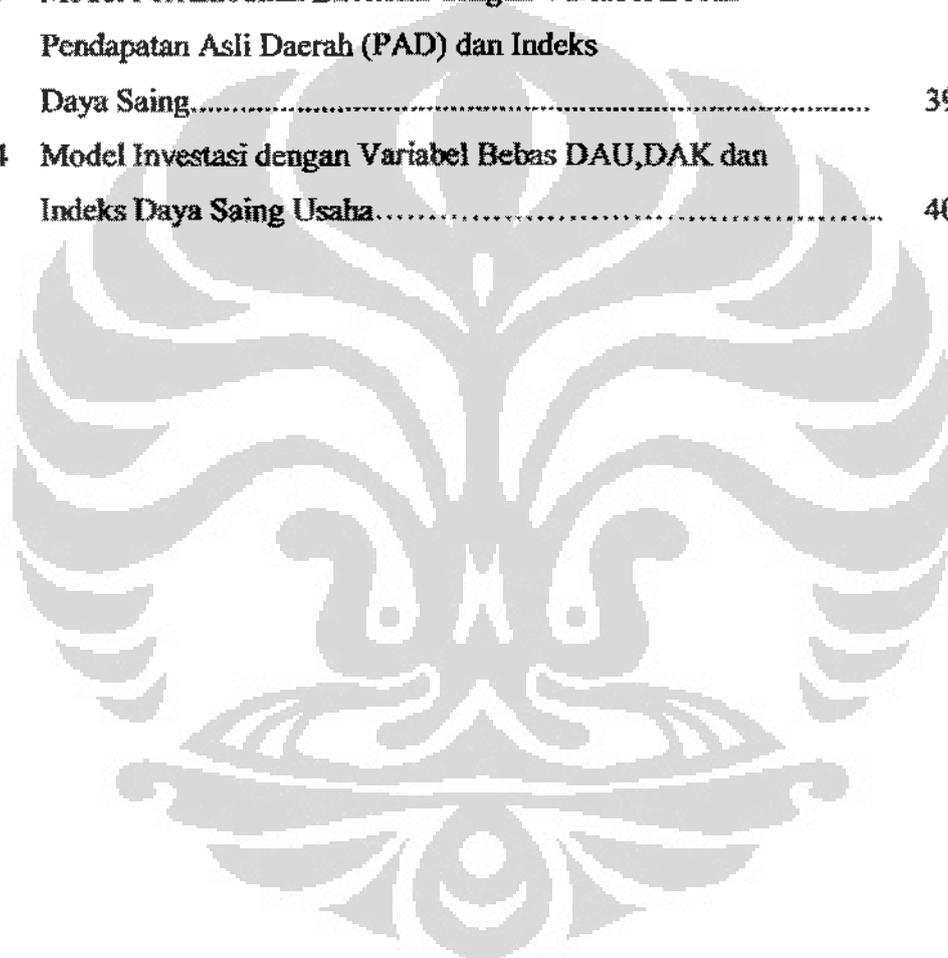


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Intergovernmental transfer</i> di Indonesia Tahun 2004-2007.....	2
Gambar 2.1	Pengaruh Transfer Bersyarat Terhadap Konsumsi Barang Publik dan Privat	6
Gambar 2.2	Pengaruh Transfer Tanpa Syarat Terhadap Konsumsi Barang Publik dan Privat	6
Gambar 2.3	Mekanisme Penetapan DAK.....	10
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Solow Swan.....	13
Gambar 3.1	Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Riil Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah).....	18
Gambar 3.2	Rata-rata Investasi dan PAD Riil di Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah)	19
Gambar 3.3	Indeks Daya Saing Usaha Kabupaten/Kota di Indonesia.....	20
Gambar 3.4	Rata-rata DAU dan DAK Riil Kabupaten/Kota yang Memiliki SDA dan Yang Tidak Memiliki SDA Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah).....	21
Gambar 3.5	Rata-rata PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 di Kabupaten/Kota yang Memiliki SDA dan Yang Tidak Memiliki SDA Tahun 2003-2007 (Dlm juta Rupiah).....	22
Gambar 3.6	Rata-rata Investasi Riil Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki SDA dan Yang Tidak Memiliki SDA Tahun 2003- 2007 (dalam Juta Rupiah).....	22
Gambar 3.7	Rata-rata PAD Riil Kabupaten/Kota yang Memiliki SDA dan Yang Tidak Memiliki SDA Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah).....	23
Gambar 4.1	Pembobotan Daya Saing Usaha.....	29
Gambar 4.2	Pembobotan Faktor Kelembagaan	30
Gambar 4.3	Pembobotan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya.....	31
Gambar 4.4	Pembobotan Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja.....	32
Gambar 4.5	Pembobotan berdasarkan Infrastruktur fisik	33
Gambar 4.5	Pembobotan Faktor Ekonomi Daerah.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	15
Tabel 4.1	Hirarki Faktor dan Variabel Pemeringkatan Indeks Daya Saing Usaha.....	29
Tabel 4.2	Model Pertumbuhan Ekonomi dengan Variabel Bebas <i>Intergovernmental Transfer</i> khususnya DAU dan DAK	38
Tabel 4.3	Model Pertumbuhan Ekonomi dengan Variabel Bebas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Daya Saing.....	39
Tabel 4.4	Model Investasi dengan Variabel Bebas DAU,DAK dan Indeks Daya Saing Usaha.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kabupaten/Kota di Indonesia yang Menjadi Unit Analisa Penelitian
- Lampiran 2 Hausman Test Model 1 dan Model 2
- Lampiran 3 Hasil Regresi Model 1
- Lampiran 4 Hasil Regresi Model 2
- Lampiran 5 Hasil Regresi Model 3
- Lampiran 6 Hasil Endogeneity Test



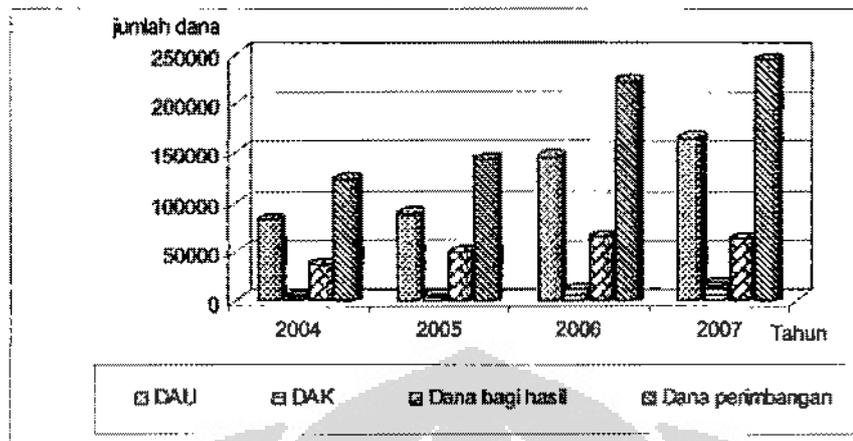
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intergovernmental transfer merupakan fenomena yang umum terjadi baik dinegara maju maupun negara berkembang dan telah menjadi skema utama dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun tujuan dari *Intergovernmental transfer* itu sendiri adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal vertikal, kesenjangan fiskal horizontal, untuk menjamin agar standar pelayanan minimum di setiap daerah terpenuhi serta untuk mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelayan publik (*inter-jurisdictional spillover effects*).

Di Indonesia semenjak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan dikeluarkannya UU No 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, selalu ada tuntutan dari pemerintah daerah untuk meminta nilai transfer yang lebih besar sehingga tidak mengherankan jika nilai transfer pusat ke daerah memiliki tren yang terus meningkat dimana pada tahun 2004 sebesar Rp. 4.036 milyar menjadi Rp. 243.967 milyar pada tahun 2007, ini berarti selama 4 tahun terjadi peningkatan *Intergovernmental transfer* rata-rata sebesar 27,16 persen per tahun. Hal ini terjadi menurut Naganathan dan Sivagnaman (1999) karena di negara-negara sedang berkembang, alokasi transfer lebih banyak didasarkan pada aspek belanja dibandingkan memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal.

Gambar 1.1 *Intergovernmental transfer* di Indonesia Tahun 2004-2007 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: LKPP Tahun 2004-2007 (diolah)

Besarnya nilai transfer membuat peran *Intergovernmental transfer* menjadi sangat penting dalam dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya transfer diharapkan daerah memiliki keleluasaan dalam membuat kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerahnya karena dianggap daerah lah yang paling mengerti kebutuhan yang diperlukan oleh warganya. Selain itu, menurut Pratikno (2002) besarnya sumber pendapatan dan belanja diantaranya akan dapat: memfasilitasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan menjaga sustainability pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Ini dapat dimaklumi mengingat daerah yang memiliki SDA yang melimpah akan mendapatkan dana bagi hasil SDA yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki SDA.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Intergovernmental transfer* khususnya DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota pada masa desentralisasi fiskal?
2. Faktor-faktor apa saja selain dari DAU dan DAK yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada masa desentralisasi fiskal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Intergovernmental transfer* khususnya DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota pada masa desentralisasi fiskal
2. Menganalisis faktor-faktor lain selain DAU dan DAK yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di era desentralisasi fiskal

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menentukan spesifikasi modelnya kemudian dilakukan regresi ekonometri menggunakan data panel dengan metode *random effect*. Sedangkan unit analisa yang digunakan adalah kabupaten/kota pada tahun 2003 sampai dengan 2007.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan setidaknya manfaat sebagai berikut :

1. Memperkaya khasanah studi empiris bagi para ekonom dan pengambil kebijakan publik di tataran nasional mengenai topik yang diteliti.
2. Memberikan umpan balik kepada pemerintah tentang dampak *intergovernmental transfer* (khususnya DAU dan DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas maka hipotesis penelitian kali ini adalah:

1. *Intergovernmental transfer* khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Variabel kontrol diantaranya adalah investasi, jumlah penduduk dan dummy sumber daya alam berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

1.6 Sistematika Penyajian

Dalam penelitian kali ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut: **BAB I PENDAHULUAN** berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian metodologi dan hipotesa penelitian, **BAB II TINJAUAN PUSTAKA** berisikan teori mengenai *intergovernmental transfer* dan pertumbuhan ekonomi, **BAB III PROFIL DAERAH** berisikan gambaran deskriptif mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi dan *intergovernmental transfer*, **BAB IV METODELOGI DAN HASIL EMPIRIS** berisikan tentang analisis ekonometrik hubungan antara *intergovernmental transfer* dengan pertumbuhan ekonomi, **BAB V KESIMPULAN** berisikan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

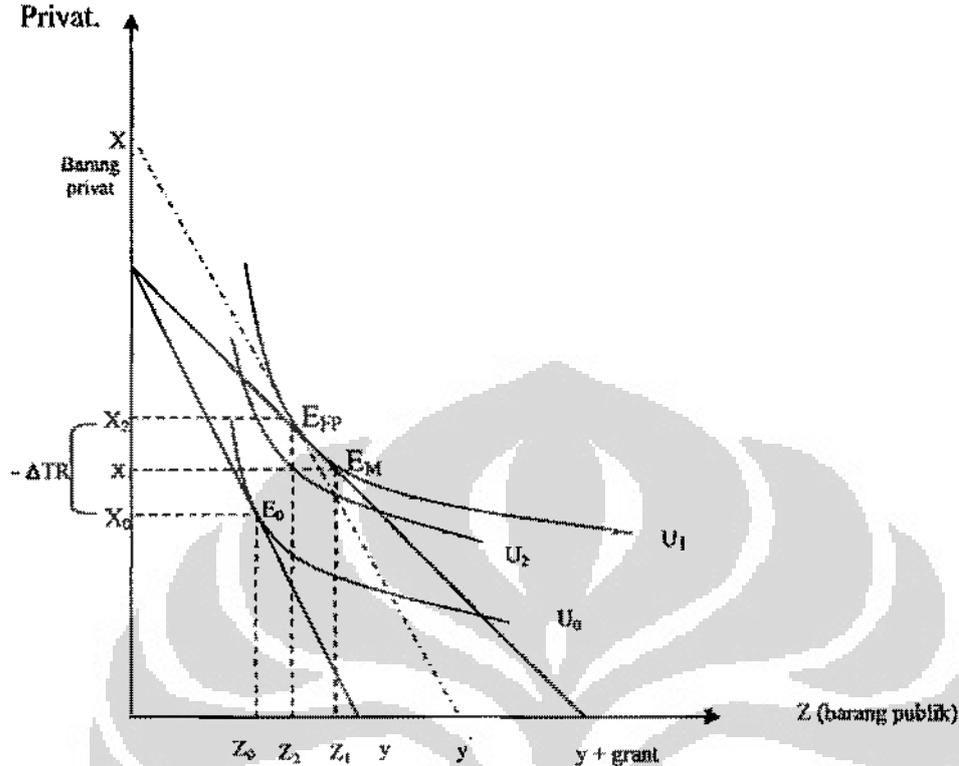
2.1 *Intergovernmental Transfer*

Pengaruh *Intergovernmental transfer* khususnya DAU dan DAK diterangkan oleh Wilde (1986) dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen seperti pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 yang menerangkan hubungan antar konsumsi barang privat dan barang publik dimana individu atau masyarakat memiliki preferensi terhadap barang publik dan barang privat dengan kurva indiferensi U_0, U_1 dan U_2 dengan kendala anggaran Y dan $Y+G$, disini diasumsikan bahwa masyarakat berperilaku rasional yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan utilitas dengan kendala anggaran.

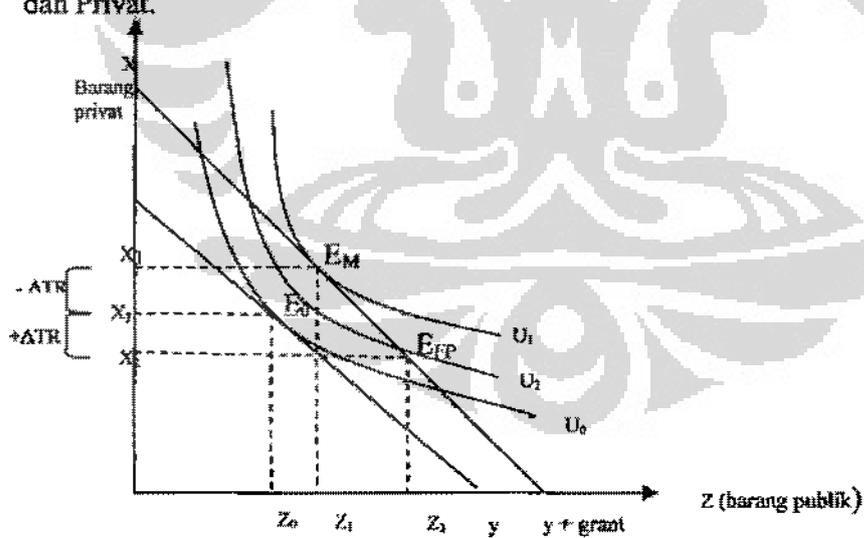
Gambar 1.2 dalam Wilde (1986) menggambarkan kondisi transfer bersyarat (dalam kasus Indonesia adalah DAK) yang akan berpengaruh terhadap konsumsi barang privat melalui efek harga, dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi untuk setiap barang publik sehingga garis anggaran bergeser ke kanan (dari y menjadi y') mengakibatkan konsumsi barang publik meningkat dari Z_1 menjadi Z_2 dimana besarnya pengaruh tersebut tergantung pada sensitivitas silangnya.

Semakin rendah harga barang publik maka akan mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah menurunkan tarif pajak dimana sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi sebesar X_1 dan setelah ada penurunan tarif pajak konsumsi barang privat menjadi sebesar X_2 . Dengan demikian maka kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian yang lain berpengaruh secara tidak langsung terhadap penurunan konsumsi barang privat melalui tarif pajak.

Gambar 2.1 Pengaruh Transfer Bersyarat Terhadap Konsumsi Barang Publik dan Privat.



Gambar 2.2 Pengaruh Transfer Tanpa Syarat Terhadap Konsumsi Barang Publik dan Privat.



Sumber: Wilde (1986)

Pada gambar 2.2 dalam kasus transfer tidak bersyarat (dalam kasus Indonesia adalah DAU), *Intergovernmental transfer* sebesar G akan membuat garis

anggaran naik dari Y menjadi $Y+G$. Disini diasumsikan bahwa barang publik merupakan barang normal sehingga transfer yang bersifat *lump-sum* mengakibatkan keseimbangan konsumen bergeser dari E_0 ke E_M sehingga konsumsi barang publik menjadi sebesar Z_1 dan barang konsumsi barang privat sebesar X_1 .

Pada transfer tanpa syarat, disatu sisi tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan turun yang akan menyebabkan penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan yaitu sebesar $-\Delta TR$, disisi yang lain pengeluaran publik tetap akan meningkat. Ini mengindikasikan bahwa transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah tidak perlu lagi menaikkan pajak untuk menyediakan barang publik.

Dengan adanya transfer maka belanja daerah akan meningkat dan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pondasi keuangan daerah. Jika pemerintah daerah mengalokasikan dananya untuk hal yang produktif, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika dana transfer tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif dan konsumtif yang dapat menimbulkan *idle money* maka akan berdampak terhadap pengendalian moneter (terutama tentang jumlah uang beredar) (Ismail dalam waluyo 2007) dan ini terjadi di Cina dimana desentralisasi ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bersifat *inflationary* (Brandt dan Zhu, 2000).

2.1.1 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, yang ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD dan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selanjutnya, sejak tahun 2002 juga diberikan transfer dalam bentuk dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.

DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) dan tanpa syarat yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dalam pengalokasian DAU, pemerintah menetapkan beberapa prinsip dasar, diantaranya yaitu: *pertama*, prinsip kecukupan (*adequacy*) dimana sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Dalam hal ini, perkataan cukup diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi. Sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan, apabila alokasi DAU mampu berespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan.

Kedua, netralitas dan efisiensi (*neutrality and efficiency*) dimana desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah, sementara efisien diartikan sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input. Untuk itu, sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia. *Ketiga*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu bahwa dalam format akuntabilitas diperlukannya format anggaran yang baru yang memungkinkan rakyat di daerah dan DPRD bisa secara transparan memonitor langsung implementasi program yang dibiayai oleh DAU. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan proses pertanggung jawaban administratif yang panjang dan tidak efisien yang pada akhirnya akan membuka celah bagi terjadinya penyelewengan keuangan.

Keempat, adanya relevansi dengan tujuan (*relevance*) dimana sistem alokasi DAU harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU yang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi, yaitu: stimulasi ekonomi daerah, peningkatan demokrasi, keadilan/pemerataan dan kemampuan daerah dalam melayani masyarakat. Prinsip dari pengalokasian DAU yang *kelima* adalah adanya keadilan (*equity*). Keadilan yang dimaksud disini sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 25/1999 yaitu pemerataan ketersediaan sumber dana antar pemerintah daerah. Dengan perkataan lain, alokasi DAU seharusnya berupaya menciptakan kondisi dimana setiap (pemerintah) daerah memiliki dasar pijakan yang sama (*to be in the same equal footing*) tanpa perlu menciptakan variasi antar daerah yang besar dalam beban perpajakan.

Keenam, objektivitas dan transparansi (*objectivity dan transparency*) yaitu bahwa sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi sehingga sistem alokasi DAU harus dibuat se jelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin, prinsip ini akan tercapai bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. *Ketujuh*, kesederhanaan (*simplicity*) dimana rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks), rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan.

Dalam upaya memenuhi prinsip pengalokasian DAU maka pemerintah membuat sebuah formulasi dalam pendistribusian dari DAU dengan rumus sebagai berikut:

$$\Sigma DAU_d = \frac{BDB}{JBSD} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana ΣDAU_d = jumlah dana alokasi umum (DAU) untuk daerah

BDB = bobot daerah yang bersangkutan

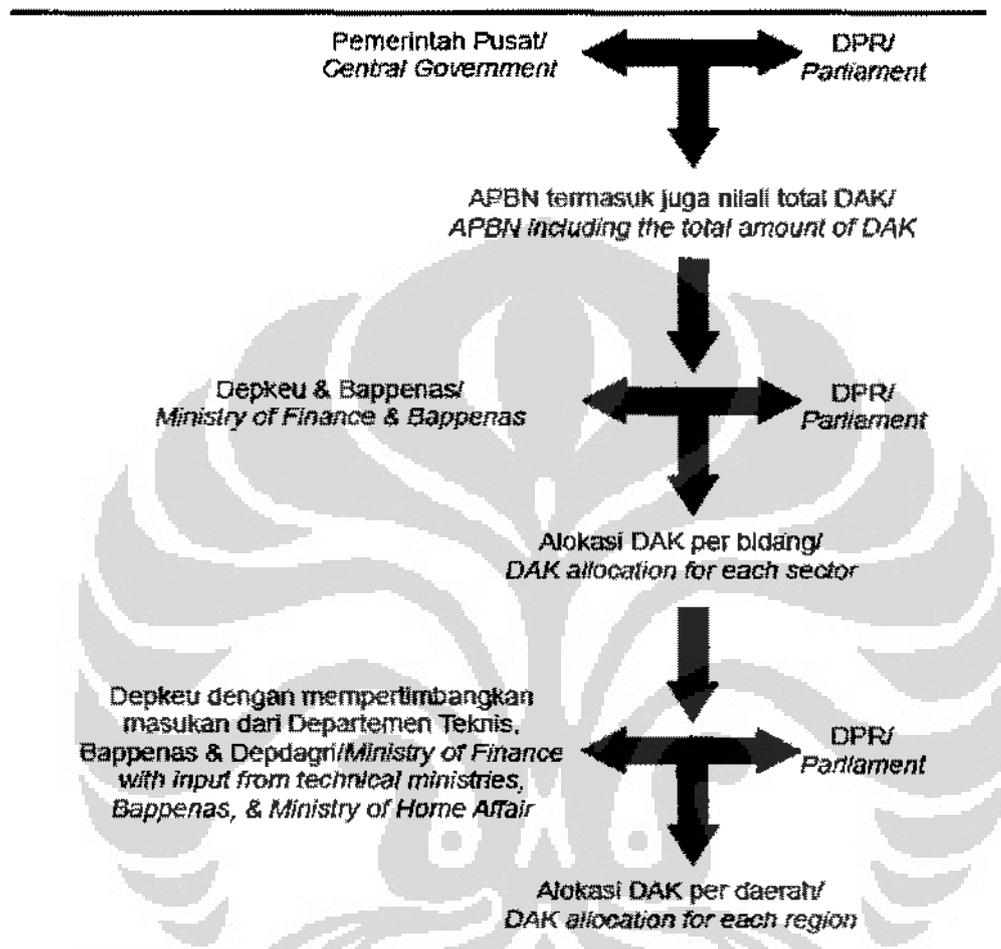
JBSD = bobot dari seluruh daerah

Besarnya bobot dari daerah sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: kebutuhan wilayah otonomi daerah yang tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. *Kedua*, potensi ekonomi daerah yang dapat tercermin dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

Sementara dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah bersifat khusus (*specific grant*) dan bersyarat yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memiliki peran yang cukup penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi -tanggung jawab dan akuntabilitas- bahwa penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Adapun penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan dari pemerintah pusat¹ seperti pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Mekanisme Penetapan DAK



Sumber: Poesoro (2008)

Dalam menentukan besarnya DAK, pemerintah mengeluarkan beberapa kriteria yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang diatur dalam UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta petunjuk teknis (Juknis) mengenai DAK. Kriteria umum ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria khusus dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.

¹ antara panitia anggaran DPR dengan pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK.

Sementara kriteria teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Namun menurut penelitian yang dilakukan Poesoro (2008) ada kendala dalam upaya perhitungan alokasi DAK untuk daerah secara tepat karena data teknis yang dijadikan sebagai landasan perhitungan DAK diberbagai bidang umumnya tidak dimutakhirkan akibat dari kurang terakomodasinya hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang umum dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam beberapa dekade terakhir, ada 2 macam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal yaitu teori pertumbuhan eksogen atau teori neo klasik yang dikemukakan oleh Harrod Domar dan Solow-Swan, dan teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer, Lukas, Grossman dan Helpman.

2.2.1 Teori Pertumbuhan Eksogen

Teori pertumbuhan ekonomi eksogen yang dikemukakan oleh Harrod dan Domar atau yang lebih dikenal dengan Harrod Domar model menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami laju yang positif jika investasi melebihi kebutuhan untuk menggantikan kapital yang terdepresiasi.

Dalam menerangkan modelnya Harrod Domar menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y(t) = C(t) + S(t) \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana pendapatan nasional terdiri dari konsumsi dan tabungan, disisi yang lain nilai output yang dihasilkan $Y(t)$ harus sesuai dengan barang yang diproduksi untuk konsumsi, $C(t)$, ditambah dengan barang yang dibutuhkan untuk investasi, $I(t)$.

$$Y(t) = C(t) + I(t) \dots\dots\dots(2.3)$$

Dari persamaan (1) dan (2) maka:

$$S(t) = I(t) \dots\dots\dots(2.4)$$

Persamaan (2.4) inilah disebut sebagai *macroeconomic balance* dimana $\text{saving} = \text{investasi}$. Adanya investasi (*capital flow*) akan meningkatkan *national capital stock*, K , dan menggantikan yang terdepresiasi δK , dan hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$I_t = \Delta K_t + \delta K_t = (K_{t+1} - K_t) + \delta K_t = K_{t+1} - (1 - \delta)K_t, \dots \dots \dots (2.5)$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I(t) \dots \dots \dots (2.6)$$

Dalam Harrod Domar, ada 2 konsep yang penting yaitu:

Saving rate, s , adalah *saving* dibagi dengan *income* sehingga $s = \frac{S(t)}{Y(t)}$ atau $S(t) =$

$s \cdot Y(t)$

Dan *capital output ratio* (COR), θ , adalah jumlah *capital* untuk menghasilkan 1

unit output dalam ekonomi sehingga $\theta = \frac{K(t)}{Y(t)}$ atau $K(t) = \theta \cdot Y(t)$

Dari persamaan (2.4) dan (2.6) maka: $K_{t+1} = (1 - \delta) \cdot K_t + S_t, \dots \dots \dots (2.7)$

Dengan asumsi bahwa s dan θ konstan maka :

$$\theta Y_{t+1} = (1 - \delta) \cdot (\theta Y_t) + s Y(t) \dots \dots \dots (2.8)$$

$$\theta(Y_{t+1} - Y_t) = Y_t (s - \delta \theta)$$

$$\frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_t} = \frac{s}{\theta} - \delta \dots \dots \dots (2.9)$$

Sisi kiri pada persamaan (2.9) merupakan laju pertumbuhan ekonomi dan bisa dilambangkan dengan g , maka:

$$g = \frac{s}{\theta} - \delta \text{ atau } \frac{s}{\theta} = g + \delta \dots \dots \dots (2.10)$$

Persamaan (2.10) ini lah yang disebut sebagai persamaan Harrod Domard dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat *saving* atau investasi, depresiasi dari kapital dan *capital output rasionya*. Laju pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan yang positif jika $s > \delta$ dan akan negatif jika $s < \delta$.

Sementara dalam Solow Swan menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi ditentukan sepenuhnya oleh elemen-elemen eksogen, misalnya laju pertumbuhan ekonomi dalam kondisi *steady state* yang independen terhadap *saving* maupun tingkat fungsi produksi

Dalam menerangkan modelnya Solow Swan menggunakan asumsi:

- *Constant return to scale* dimana $f(cK, cAL) = cf(k, AL)$
- Input dalam fungsi produksi adalah k dan AL dimana A adalah teknologi yang menempel di labor.

$$Y = f(K, AL) \dots \dots \dots (2.11)$$

$$\frac{Y}{AL} = f\left(\frac{K}{AL}, \frac{AL}{AL}\right) \dots \dots \dots (2.12)$$

$$y = f(k, l) \dots \dots \dots (2.13)$$

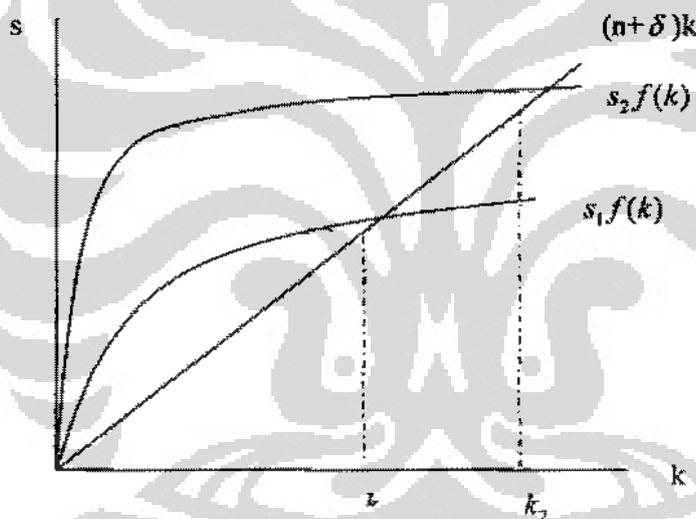
$$y = f(k) \dots \dots \dots (2.14)$$

Persamaan Solow Swan ini menjelaskan bahwa output akan naik jika terjadi peningkatan *capital per efective labor*.

Dalam kondisi yang dinamik, model persamaan Solow Swan adalah:

$$k(t) = s + f(k(t)) - (n + g + \delta)k(t) \dots \dots \dots (2.15)$$

Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Solow Swan



Sumber: Romer, David (2006)

Menurut Solow Swan bahwa peningkatan *saving rate* akan meningkatkan *actual invasment*, peningkatan investasi tersebut akan membuat output meningkat dan bertahan pada level yang lebih tinggi. Dengan demikian berarti bahwa *capital stock* per kapita akan menjadi lebih tinggi disetiap periode setelah kenaikan *saving rate*. Untuk meningkatkan output pada level yang lebih tinggi perlu peningkatan *capital stock per capita* (dari k_1 ke k_2), tetapi tidak akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dalam jangka panjang.

Metode yang banyak digunakan untuk menguji pertumbuhan eksogen atau neo klasik tersebut diatas adalah dengan menggunakan pendekatan *growth accounting* dengan melakukan dekomposisi pertumbuhan ekonomi kedalam sejumlah faktor determinan. Namun hasil studi tersebut menunjukkan beberapa kelemahan, diantaranya: *pertama*, ide bahwa kemajuan teknis dapat diperlakukan sebagai input terpisah dalam proses produksi yang bebas dari model atau variabel lain dalam sistem memiliki masalah yaitu diabaikannya aktivitas inovasi yang tidak tercermin dalam model neo klasik yang menyederhanakan bahwa kemajuan teknologi bersifat eksogen.

Kedua, lemahnya asumsi *constant to return scale* (CRS) karena banyak input teknologi seperti *blue print* atau pengetahuan yang secara alami merupakan *non rival* sehingga dapat digunakan dalam proses produksi dengan biaya marginal kecil bahkan nol, dengan demikian jika input *non rival* tersebut digunakan dalam produksi maka diharapkan terjadi *increasing return to scale* (IRS) karena output meningkat lebih cepat dibandingkan biaya input.

2.3 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kaitannya pengaruh desentralisasi fiskal yang ditandai dengan adanya *intergovernmental transfer* yang lebih besar dari pusat ke daerah sebenarnya tidak ada teori formalnya, hal tersebut dikemukakan oleh Oates (1993). Penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini, misalnya oleh Akai, Nisimura dan Sakata (2004) menggunakan pendekatan fungsi produksi dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja.

Modal yang dimaksud antara lain adalah investasi, selama ini investasi bisa berasal dari pemerintah dan swasta baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi dalam negeri yang berasal dari pemerintah biasanya bersumber dari APBD. Dengan uraian tersebut maka ada hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian antara lain dilakukan oleh Akai, Nisimura dan Sakata (2004) yang menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal sedangkan studi yang dilakukan oleh Zhang dan Jou (1996) menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi regional di China.

Di Indonesia sendiri studi yang belum lama dilakukan oleh Pusporini (2006) yang mengambil data tahun 2001-2003 memperlihatkan bahwa desentralisasi dari sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi dimana dana perimbangan dan PAD memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pengaruhnya sangat kecil. Studi lain yang dilakukan oleh Mulyadi (2005) pada tahun 1991-1999 menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran rutin dan pembangunan serta penerimaan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Adapun ukuran untuk melihat ukuran dari pertumbuhan ekonomi regional banyak cara yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dimana Yilmaz (2004) dan Pusporini (2006) melihat dari peningkatan PDRB, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) dan Brata (2004) melihatnya dari penambahan pendapatan per kapita riil.

Implikasi dari pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan secara teoritik. Namun berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya memperlihatkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, diantaranya yaitu sisi pengeluaran baik pengeluaran pembangunan maupun rutin dan sisi penerimaan pemerintah. Dari sisi penerimaan, dimana penerimaan yang terhimpun oleh pemerintah akan menjadi modal dan oleh pemerintah modal tersebut akan dikeluarkan melalui belanja pemerintah yang diharapkan dapat menstimulus kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Studi	Negara	Hasil
1	Akai, Nisimura dan Sakata (2002)	Amerika (1992-2002)	-Hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah - Hubungan negatif antara total penerimaan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah - Hubungan positif antara pengeluaran pemerintah

			<p>dengan tingkat pertumbuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan positif antara jumlah penduduk dan level pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah
2	Davoodi dan Zou (1998)	<p>Negara berkembang dan negara maju</p> <p>Amerika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desentralisasi berhubungan negatif antara dengan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun negara berkembang - Di Amerika desentralisasi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi meskipun rendah
3	Zhang dan Zou (1996)	China (1980-1992)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan negatif antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi - Tenaga kerja, investasi dan inflasi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi - Pajak memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi
4	Pusporini (2006)	Kabupaten/kota di Indonesia (2001-2003)	<ul style="list-style-type: none"> - Dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi meskipun kecil. - Pendapatan per kapita dan jumlah penduduk berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi - Pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa dan Bali lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa dan Bali

BAB III KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL

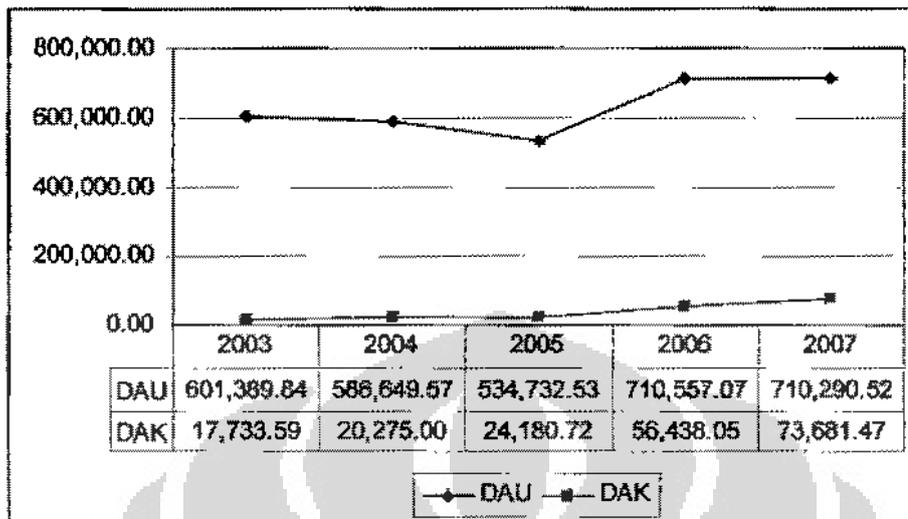
Bab ini menyajikan hasil pengolahan data sekunder dimana analisis yang digunakan dalam bab ini adalah analisis deskriptif mengenai profil perekonomian daerah/kota di Indonesia yang disajikan dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, analisis perekonomian kabupaten/kota secara umum, *kedua*, analisis perekonomian daerah berdasarkan wilayah yang memiliki SDA minyak dan gas dan yang tidak memiliki SDA.

3.1 Perekonomian Kabupaten/Kota di Indonesia

Desentralisasi fiskal di Indonesia yang ditandai dengan di keluarkannya UU No 25 Tahun 1999 telah membawa perubahan yang cukup berarti dalam dinamika perekonomian Indonesia dimana desentralisasi tersebut ditandai dengan adanya transfer dana yang cukup besar yang diringi dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah atau *money follows function*. Adanya transfer yang cukup tinggi tersebut menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola pemerintah pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab daerah melalui APBD meningkat tajam sehingga pemerintah daerah harus cukup jeli dan berhati-hati dalam mengalokasikan dananya karena banyak fungsi-fungsi yang tadinya dipegang oleh pemerintah pusat sekarang beralih kepada pemerintah daerah.

Terjadinya peningkatan tranfer yang cukup besar dari pemerintah pusat kepada daerah tersebut dapat dilihat di gambar 3.1 yang memiliki tren yang terus meningkat setiap tahunnya, dimana jumlah DAU secara umum lebih besar dibandingkan DAK tetapi apabila dilihat dari rata-rata peningkatannya pertahun DAK lebih besar yaitu sebesar 14,33 persen sementara DAU terjadi rata-rata peningkatan sebesar 5,39 persen pertahun selama kurun waktu 2003-2007.

Gambar 3.1 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Riil Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Data Sekunder (diolah)

Jumlah dana transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk DAU yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan DAK beralasan karena DAU bersifat *block grant* yang memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk membelanjakannya sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya karena di era desentralisasi ini dianggap bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi prioritas kebutuhan dari daerahnya.

Meskipun jumlah DAU lebih besar dibandingkan dengan DAK, namun dilihat dari sisi peningkatannya DAK mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan DAU, ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kebutuhan khusus yang mendapat DAK dari pemerintah pusat. Dana khusus tersebut digunakan untuk pembangunan diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis prasarana baru penunjang investasi, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, saluran drainase primer dan lain sebagainya.

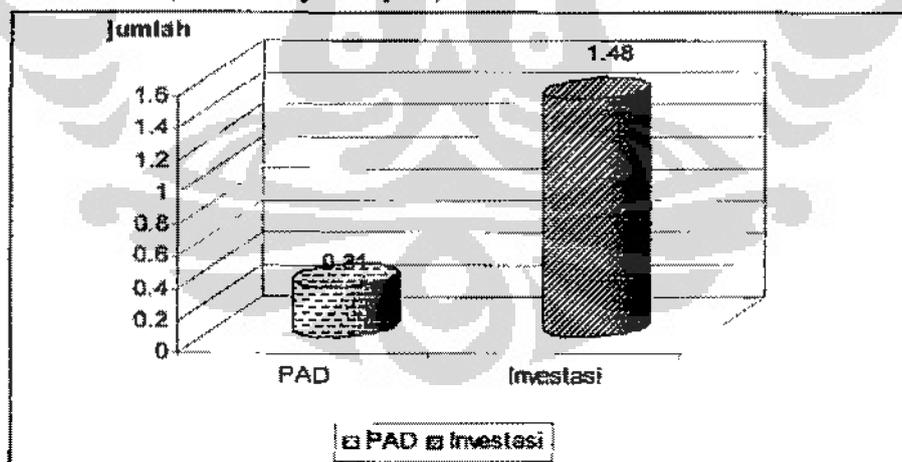
DAU diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk menutup *fiscal gap* yaitu kondisi dimana kebutuhan daerah tidak sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Variabel-variabel yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan besarnya DAU yang di berikan, untuk kebutuhan daerah

paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

Dengan konsep *fiscal gap* maka distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang *fiscal capacity*-nya lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU-nya akan negatif.

Dilihat dari nilai investasi riilnya, rata-rata investasi yang masuk di kabupaten/kota di Indonesia adalah sebesar Rp 1,48 milyar. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah rata-rata PAD yang berhasil dikumpulkan oleh daerah yaitu sebesar Rp 0,31 milyar. Kecilnya rata-rata PAD yang berhasil dikumpulkan oleh kabupaten/kota membuat PAD belum bisa diandalkan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan padahal kedepannya di era desentralisasi fiskal diharapkan PAD menjadi salah satu sumber utama pembangunan daerah sehingga kedepannya diharapkan adanya peningkatan.

Gambar 3.2 Rata-Rata Investasi dan PAD Riil di Kabupaten/kota Tahun 2003-2007 (dalam Milyar Rupiah)

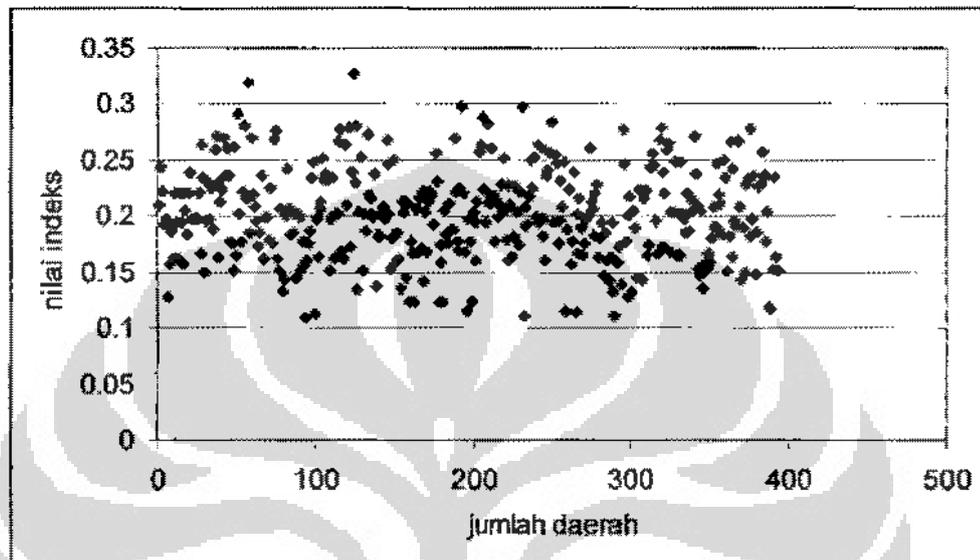


Sumber: Data Sekunder (diolah)

Dengan adanya peningkatan investasi dan PAD diatas diharapkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang pada tahun 2003-2007 rata-rata sebesar 5,22 persen.

Selain itu, apabila dilihat dari indeks daya saing investasi, banyak kabupaten/kota memiliki indeks rata-rata sebesar 0,2. Angka ini menunjukkan bahwa iklim usaha kabupaten/kota perlu masih rata-rata dan belum bisa dibilang bagus mengingat indeks daya saing usaha yang ideal adalah 1.

Gambar 3.3 Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia



Sumber: Data Sekunder (diolah)

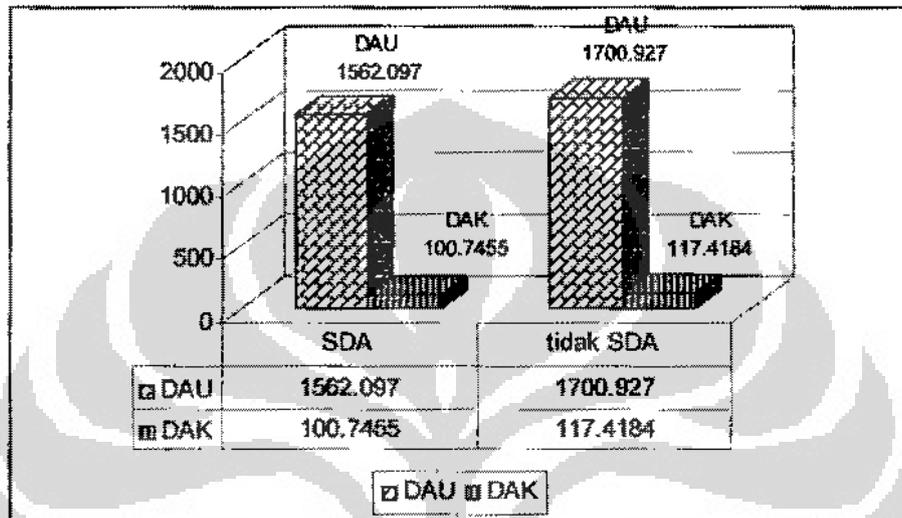
3.2 Perekonomian Kabupaten/Kota Berdasarkan Sumber Daya Alam (SDA) yang Dimiliki

Di wilayah KIB ada sekitar 166 dari total 211 kabupaten/kota yang tidak memiliki SDA minyak dan gas, ini berarti bahwa sebagian besar wilayah di KIB atau 78,67 persen tidak memiliki SDA dan hanya 21,33 persen yang memiliki SDA minyak dan gas. Sementara di KIT ada sekitar 109 dari 126 wilayah yang tidak memiliki SDA yang berarti bahwa sekitar 86,51 persen tidak memiliki SDA minyak dan gas dan hanya 13,49 persen yang kaya akan SDA minyak dan gas. Ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan SDA yang ada di wilayah KIB tidak terlalu jauh dengan yang ada di KIT.

Dilihat dari transfer DAU dan DAK yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten/kota, ternyata rata-rata transfer yang lebih besar baik DAU maupun DAK terjadi di wilayah yang tidak memiliki SDA sementara di daerah yang memiliki SDA minyak dan gas, rata-rata penerimaan DAU dan DAK nyalebih kecil. Ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan daerah-daerah

yang kaya memang memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki SDA sehingga mereka lebih mampu membiayai kegiatan ekonominya di era desentralisasi fiskal dan tidak terlalu tergantung pada DAU maupun DAK, hal tersebut dapat di lihat di gambar 3.4.

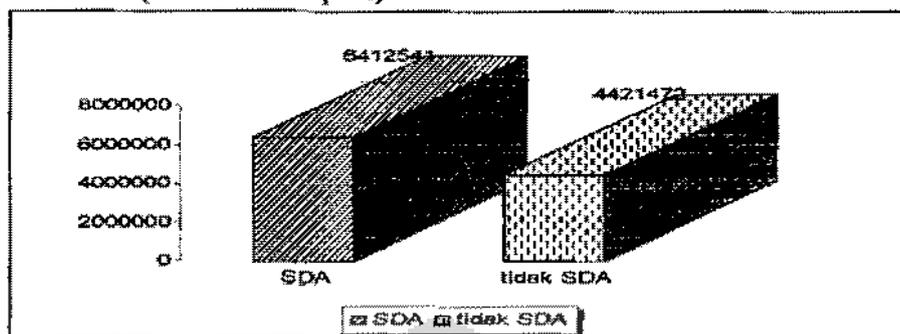
Gambar 3.4 Rata-rata DAU dan DAK Riil Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki SDA dan Tidak Memiliki SDA Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Data Sekunder (diolah)

Selain itu kemampuan suatu daerah juga dapat dilihat dari PDRBnya, apabila dilihat dari PDRBnya daerah yang memiliki SDA memang memiliki PDRB yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki SDA, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.9 dimana daerah yang memiliki SDA rata-rata per tahunnya berhasil mengumpulkan PDRB sebesar Rp 6.412.541 Juta sementara daerah yang tidak memiliki SDA hanya mampu mengumpulkan PDRB rata-rata pertahun sebesar Rp 4.421.473 Juta.

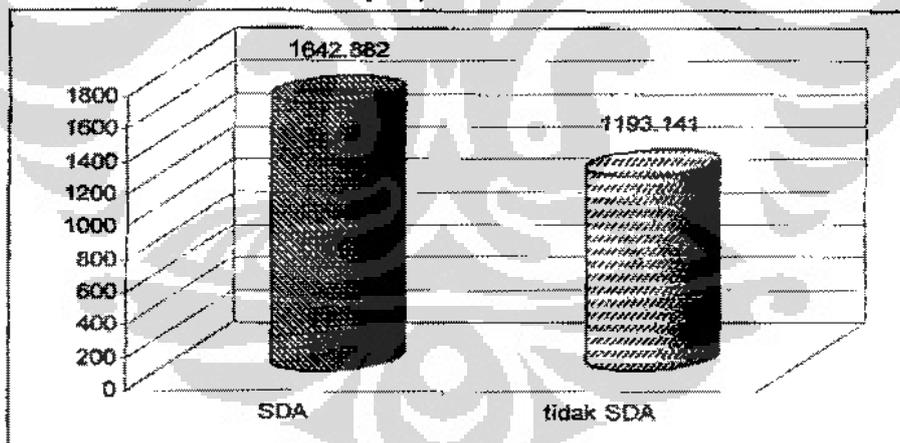
Gambar 3.5 Rata-rata PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 di Kabupaten/Kota yang Memiliki SDA dan Tidak Memiliki SDA Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Data Sekunder (diolah)

Hal tersebut diatas terjadi karena memang investasi yang berhasil dikumpulkan di daerah yang memiliki SDA yang melimpah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki SDA sebagaimana terlihat pada Gambar 3.10. Kondisi ini tidak mengherankan karena di daerah yang memiliki SDA, banyak investor baik PMA maupun PMDN yang berkeinginan menanamkan modalnya disana .

Gambar 3.6 Rata-rata Investasi Riil Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki SDA dan Tidak Memiliki SDA Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah)



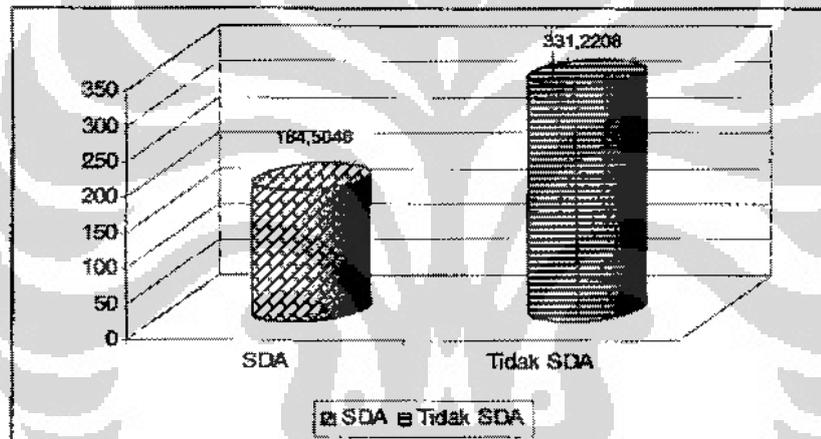
Sumber: Data Sekunder (diolah)

Meskipun investasi yang ada di daerah yang memiliki SDA lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki SDA ternyata tidak serta merta PAD yang berhasil dikumpulkan juga lebih tinggi, hal tersebut dapat dilihat di Gambar 3.7 yang memperlihatkan bahwa PAD di daerah yang memiliki SDA tidak lebih tinggi dari daerah yang memiliki SDA. Hal ini menunjukkan bahwa

daerah yang tidak memiliki SDA yang melimpah juga mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam pengumpulan PAD lewat pajak dan distribusi.

Kewenangan pengumpulan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk desentralisasi fiskal yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dimana penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.

Gambar 3.7 Rata-rata PAD Riil Kabupaten Kota yang Memiliki SDA dan Tidak Memiliki SDA Tahun 2003-2007 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Data Sekunder (diolah)

BAB IV METODELOGI DAN ANALISIS DATA

4.1 Spesifikasi Model

Analisis hubungan antara *Intergovernmental transfer* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah/kota dalam model teoritiknya dinyatakan dalam:

$$Y = (DAU, DAK, Z) \dots \dots \dots (4.1)$$

Selain *Intergovernmental transfer*, akan diuji juga pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD) dan indeks daya saing usaha (i) terhadap pertumbuhan ekonomi, maka model teoritiknya adalah:

$$I = (PAD, i, Z) \dots \dots \dots (4.2)$$

Dimana: DAU = Dana alokasi umum

DAK = Dana alokasi khusus

PAD = Pendapatan asli daerah

Idsu = Indeks daya saing usaha

Z = Variabel kontrol

Unit analisa dalam penelitian adalah kabupaten/kota pada tahun 2003-2007, dipilihnya kabupaten dan kota sebagai unit analisa karena desentralisasi fiskal di Indonesia diberikan pada tingkat kabupaten dan kota dan untuk daerah/kota yang mengalami pemekaran, datanya disatukan dengan daerah induknya. Sementara pemilihan kurun waktu 2003-2007 karena penelitian pada 3 tahun awal desentralisasi fiskal sudah banyak dilakukan, selain itu pada tahun 2003-2007 pemerintah kabupaten/kota sudah mulai *stabilish* menjalankan kebijakan di era desentralisasi fiskal.

Adapun dalam studi ini yang dijadikan sebagai variabel dependent (variabel terikat) adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diukur dengan perubahan PDRB kabupaten/kota. Sedangkan untuk variabel bebasnya adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) riil, dana alokasi khusus (DAK) riil, dan indeks daya saing usaha (Idsu) dengan variabel kontrol investasi riil (Inv), jumlah Penduduk (Pddk).

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakteristik daerah maka perlu diketahui pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan SDA yang dimilikinya, sehingga untuk mempermudahnya, analisis dinyatakan dalam bentuk dummy.

Dummy wilayah yang memiliki SDA minyak dan gas dinyatakan dengan 1 dan 0 untuk wilayah yang tidak kaya SDA minyak dan gas ($Dsda$).

Berdasarkan persamaan model teoritik 1 dan 2, analisis kedalam model empirik diterjemahkan ke dalam model ekonometrik sehingga persamaannya menjadi:

Model 1:

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 DAU + \alpha_2 DAK + \alpha_3 Pddk + \alpha_4 Inv + \alpha_5 Dsda \dots\dots\dots(4.3)$$

Model 2 :

$$y = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 Idsu + \beta_3 Pddk + \beta_4 Inv + \beta_5 Dsda \dots\dots\dots(4.4)$$

Dan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi investasi maka model yang ke tiga adalah:

$$I = \delta_0 + \delta_1 DAU + \delta_2 DAK + \delta_3 Idsu + \delta_4 Dsda \dots\dots\dots(4.5)$$

Dimana:

y = Pertumbuhan ekonomi

DAU = Dana alokasi umum riil

DAK = Dana alokasi khusus riil

$Pddk$ = Jumlah penduduk

Inv = Investasi Riil

$Idsu$ = Indeks daya saing usaha

$Dsda$ = Dummy wilayah SDA,

1 = wilayah yang kaya SDA minyak dan gas

0 = wilayah yang miskin SDA minyak dan gas

4.2 Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi, diantaranya adalah: Statistik keuangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Badan Pusat statistik (BPS) dari tahun 2003-2007, Perkembangan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) Tahun 2001-2008 yang diterbitkan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Perencanaan, pemantauan dan Evaluasi DAK, Bappenas, APBD kabupaten/Kota Tahun 2003-2007 oleh Departemen Keuangan, serta sumber-sumber data yang lain.

Data-data diatas masih dalam bentuk harga berlaku (nominal) sehingga untuk mengetahui nilai riilnya perlu dibagi dengan indeks harga konsumen. Berikut ini adalah uraian data-data yang akan dipergunakan, yaitu:

Pertumbuhan Ekonomi

Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDRB) kabupaten/kota yang berasal dari BPS. Adapun PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan tahun 2000, dengan menggunakan rumus:

$$PDRB_{HK,t} = \frac{100}{DeflatorGDP_t} \times PDRB_{HB,t} \dots\dots\dots(4.5)$$

Dimana: $PDRB_{HK,t}$ = PDRB dengan harga konstan pada tahun t

$PDRB_{HB,t}$ = PDRB dengan harga berlaku pada tahun t

Sedangkan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, digunakan rumus sebagai berikut:

$$y = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \dots\dots\dots(4.6)$$

Dimana: y = Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = PDRB pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB pada tahun t-1

Dana Alokasi Umum Riil(DAU)

DAU adalah salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Untuk membuat DAU nominal yang ada menjadi riil maka DAU perlu dibagi dengan indeks harga konsumen. Namun karena ketidakterediaan data IHK berdasarkan harga konstan tahun 2000, maka DAU yang ada dibagi dengan indeks

harga perdagangan besar (IHPB) pada tahun t dengan harga konstan 2000, sehingga rumusnya menjadi:

$$DAUr_{iit}, = \frac{DAU_t}{IHPB_t} \dots\dots\dots(4.7)$$

Dimana: DAU_t = Dana alokasi umum pada tahun t

$IHPB_t$ = Indeks harga perdagangan besar pada tahun t

Data DAU tersebut diambil dari Statistik keuangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Badan Pusat statistik (BPS) dari tahun 2003-2007, Perkembangan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) Tahun 2001-2008 yang diterbitkan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Perencanaan, pemantauan dan Evaluasi DAK, Bappenas dan dari DJPK Departemen Keuangan.

Dana Alokasi Khusus Riil (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi DAK sifatnya tidak block grant, pemerintah pusat yang menentukan penggunaannya dimana besaran DAK tersebut ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Adapun DAK riilnya adalah:

$$DAK_{riit}, = \frac{DAK_t}{IHPB_t} \dots\dots\dots(4.8)$$

Dimana: DAK_t = Dana alokasi umum pada tahun t

$IHPB_t$ = Indeks harga perdagangan besar pada tahun t

Data DAU tersebut diambil dari Statistik keuangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Badan Pusat statistik (BPS) dari tahun 2003-2007, Perkembangan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) Tahun 2001-2008 yang diterbitkan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Perencanaan, pemantauan dan Evaluasi DAK, Bappenas dan dari DJPK Departemen Keuangan.

Investasi Riil (Irv)

Definisi investasi diambil dari definisi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), yaitu investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) disemua sektor kecuali di investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam rangka kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, investasi portofolio(pasar modal) dan investasi rumah tangga. Data tersebut diperoleh dari BKPM. Adapun Investasi riilnya adalah:

$$Investasiriil_t = \frac{(PMA + PMDN)_t}{IHPB_t} \dots\dots\dots(4.8)$$

Dimana: PMA_t = Penanaman modal asing pada tahun t

$PMDN$ = Penanaman modal dalam negeri pada tahun t

$IHPB_t$ = Indeks harga perdagangan besar pada tahun t

Jumlah Penduduk (pddk)

Definisi jumlah penduduk diambil dari definisi BPS yaitu jumlah penduduk baik yang masuk didalam angkatan kerja maupun yang bukan angkatan kerja. Data jumlah penduduk tersebut diambil dari Provinsi Dalam Angka, BPS.

Indeks Daya Saing Investasi (Idsu)

Merupakan nilai yang menunjukkan kondisi iklim usaha suatu daerah kabupaten/kota. Data diambil dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dari Tahun 2003-2005.

Nilai dari indeks daya saing usaha ini memiliki range 0 sampai 1, semakin besar indeks daya saing investasi mendekati angka 1, menunjukkan bahwa iklim usaha suatu daerah kabupaten/kota semakin sehat dan adanya kemudahan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Dan sebaliknya apabila indeks daya saing usaha mendekati 0, maka daerah tersebut memiliki iklim usaha yang tidak sehat dan tidak memiliki kejelasan prosedur penanaman modal.

Adapun faktor dan variabel yang digunakan KPPOD dalam mengukur indeks daya saing suatu daerah adalah sebagai berikut:

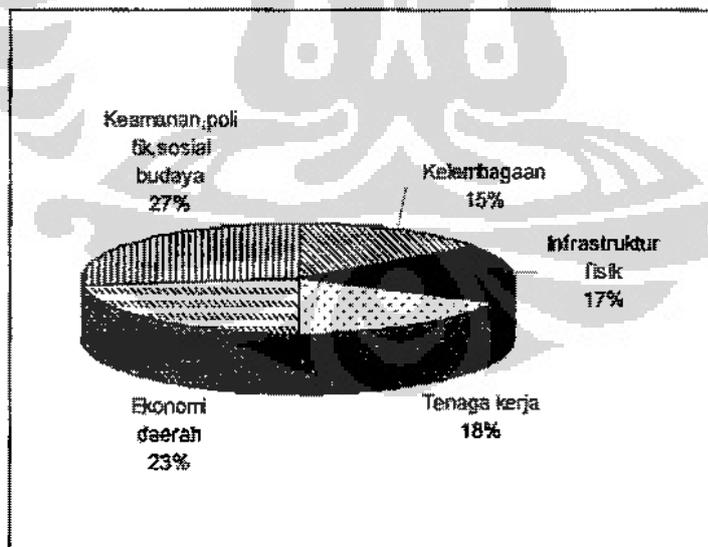
Tabel 4.1 Hirarki Faktor dan Variabel Pemeringkatan Indeks Daya Saing Usaha

DAYA TARIK INVESTASI DAERAH				
Kelembagaan	Keamanan, Politik Sosial Budaya	Ekonomi Daerah	Tenaga Kerja	Infrastruktur Fisik
- Kepastian hukum	- Keamanan	-Potensi Ekonomi	- Ketersediaan TK	-Ketersediaan infrastruktur fisik
- Aparatur & pelayanan	-Politik	-Struktur Ekonomi	-Kualitas TK	-Kualitas infrastruktur fisik
- Kebijakan daerah	-Budaya		-Biaya TK	
- Kepemimpinan lokal				

Sumber: KPPOD, 2005

Masing-masing faktor dan variabel yang digunakan oleh KPPOD tersebut diberikan bobot tergantung pada seberapa besar faktor dan variabel tersebut dapat mempengaruhi daya saing usaha daerah, semakin besar pengaruhnya maka bobot yang diberikan lebih besar. Dan KPPOD memberikan bobot kepada faktor keamanan, politik, sosial dan budaya lebih besar, disusul oleh faktor ekonomi daerah, tenaga kerja, infrastruktur fisik dan terakhir adalah kelembagaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 4.1

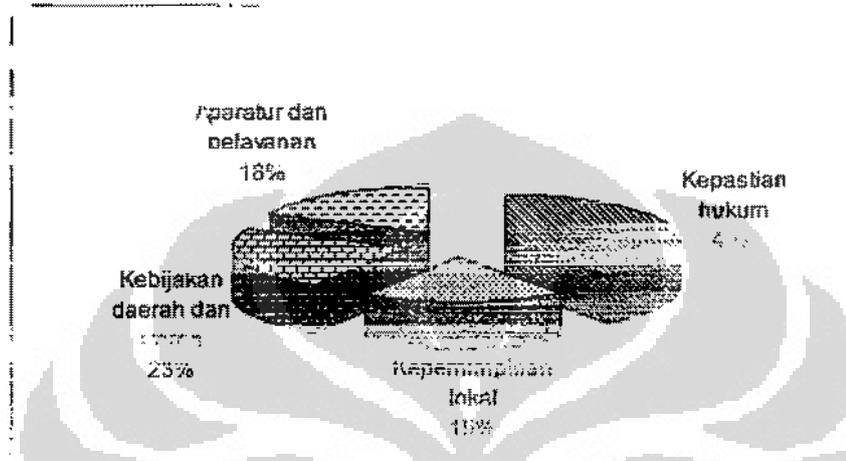
Gambar 4.1 Pembobotan Daya saing Investasi



Sumber: KPPOD Tahun 2005

Dari masing-masing faktor tersebut diatas kemudian diturunkan menjadi variabel, dimana masing-masing variabel tersebut kemudian diberi bobot, untuk faktor kelembagaan, kepastian hukum diberi bobot yang lebih besar disusul oleh kebijakan daerah dan perda, kepemimpinan local kemudian aparatur dan pelayanan. (lihat Gambar 4.2)

Gambar 4.2 Pembobotan Faktor Kelembagaan



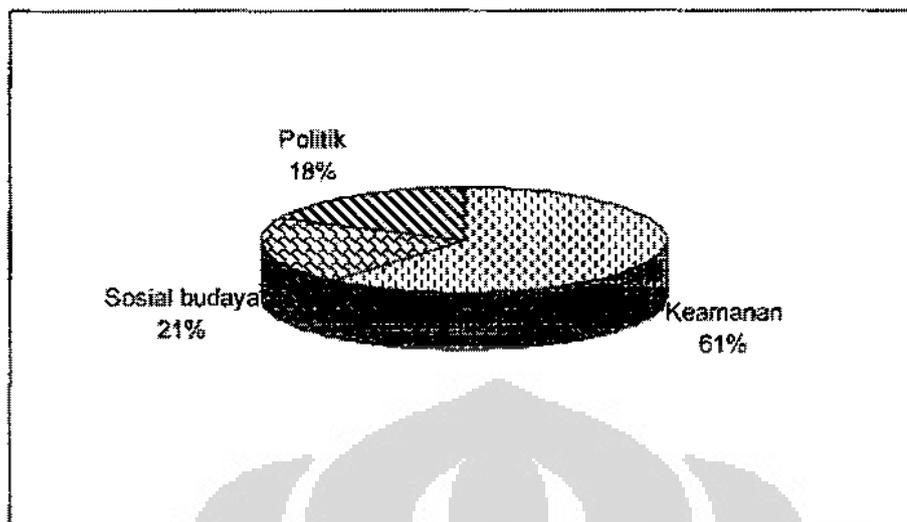
Sumber: KPPOD (diolah)

Angka yang dijadikan ukuran untuk masing-masing variabel dari faktor kelembagaan adalah sebagai berikut:

- Kepastian hukum terdiri dari: konsistensi peraturan, menepakan kepastian peradilan, kecepatan aparatur keamanan, pungutan liar diluar birokrasi
- Aparatur dan Pelayanan terdiri dari : respon pemda terhadap permasalahan dunia usaha, birokrasi pelayanan dunia usaha, informasi potensi daerah, menyalahgunakan kewenangan oleh aparat
- Kebijakan daerah dan peraturan daerah (Perda) terdiri dari: kejelasan tarif, kejelasan prosedur pelayanan pemerintahan, serta kebijakan lain yang menarik
- Kepemimpinan lokal terdiri dari : kepemimpinan kepala daerah, Inisiatif dan kreativitas, kedudukan kepala daerah dengan perda

Sementara untuk faktor keamanan, politik dan social budaya, pembobotan tertinggi diberikan kepada faktor keamanan, kemudian social budaya dan yang terakhir adalah politik. (lihat Gambar 4.3)

Gambar 4.3 Pembobotan Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya



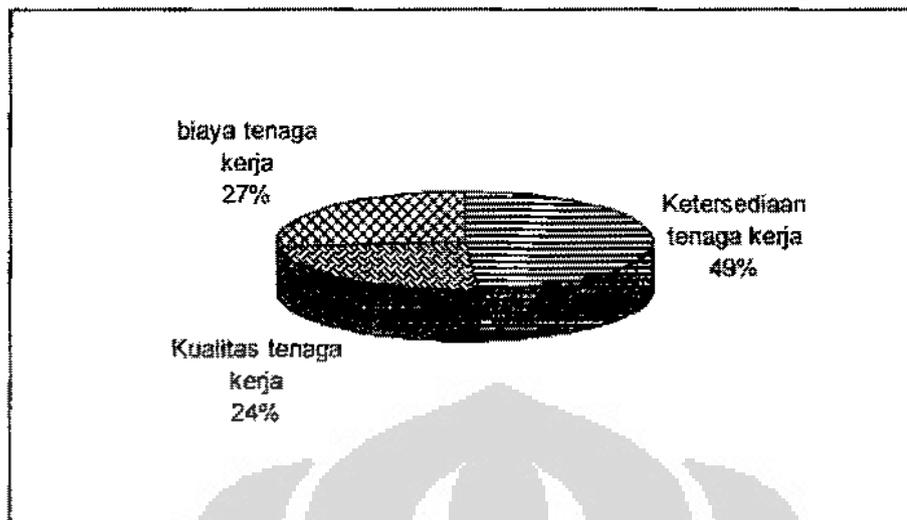
Sumber: KPPOD (diolah)

Untuk masing-masing variabel dari faktor keamanan, politik dan sosial budaya adalah sebagai berikut:

- **Keamanan** : keamanan usaha, keamanan masyarakat, dampak unjuk rasa.
- **Politik** : hubungan eksekutif dan legislatif, hubungan antar partai politik
- **Sosial budaya** : Keterbukaan masyarakat terhadap budaya dan tenaga kerja dari luar negeri, etos kerja masyarakat, kemudahan memperoleh hak penguasaan tanah, potensi konflik di masyarakat.

Tenaga kerja merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan. Untuk itu perlu strategi untuk mengembangkan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, baru kemudian kualitas dari tenaga kerja. (lihat Gambar 4.2)

Gambar 4.4 Pembobotan Berdasarkan Faktor Tenaga Kerja



Sumber: KPPOD (diolah)

Ukuran yang digunakan untuk variabel tenaga kerja adalah sebagai berikut:

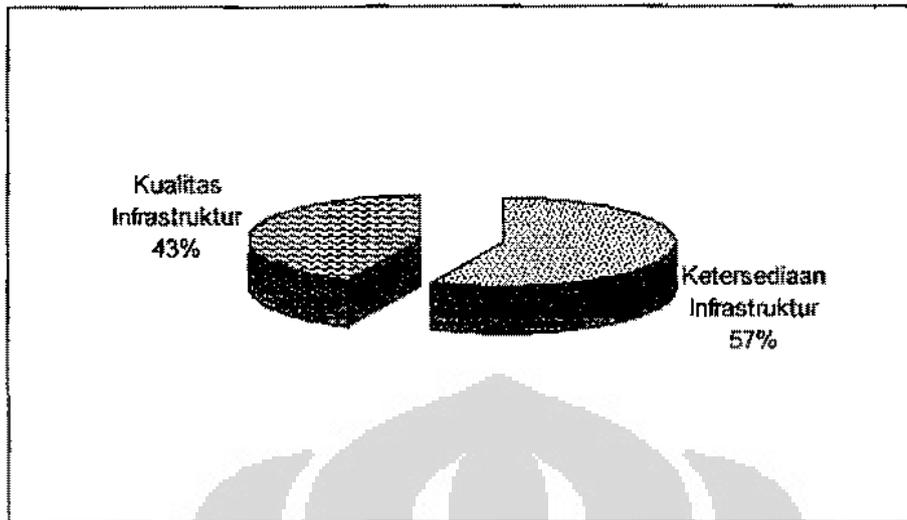
- Ketersediaan tenaga kerja terdiri dari: tenaga kerja usia produktif dan tenaga kerja pencari kerja
- Kualitas tenaga kerja terdiri dari : produktivitas dan pendidikan tenaga kerja
- Biaya tenaga kerja terdiri dari : Biaya tenaga kerja formal dan aktual

Sementara untuk faktor infrastruktur fisik, KPPOD mengukurnya dari dua hal yaitu:

- Ketersediaan infrastruktur: ketersediaan jalan darat, pelabuhan laut, udara, sambungan telpon, pasokan listrik
- Kualitas infrastruktur: kualitas jalan darat, pelabuhan laut, udara, sambungan telpon dan tegangan listrik.

Dimana ketersediaan infrastruktur diberi bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas dari infrastruktur itu sendiri. (lihat Gambar 4.5)

Gambar 4.5 Pembobotan berdasarkan Infrastruktur fisik



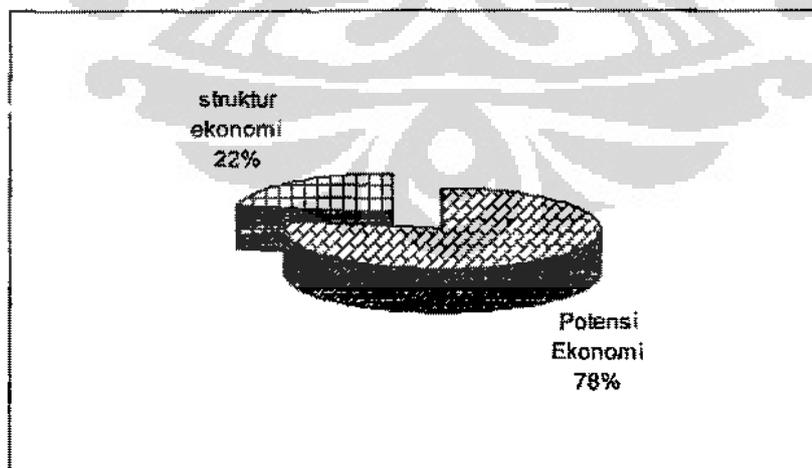
Sumber: KPPOD (diolah)

Dan faktor berikutnya yang dijadikan sebagai alat untuk mengukur indeks daya saing usaha adalah kondisi ekonomi daerah, yang terdiri dari:

- Potensi daerah : PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, indeks kemahalan konstruksi
- Struktur ekonomi : pertumbuhan sektor primer, sektor sekunder dan tersier

Dari kedua variabel yang dijadikan ukuran untuk ekonomi daerah, KPPOD memberi bobot yang lebih besar terhadap potensi daerah dibandingkan dengan struktur ekonomi. (lihat Gambar 4.6)

Gambar 4.6 Pembobotan Faktor Ekonomi Daerah



Sumber: KPPOD (diolah)

4.3 Metode Estimasi Model

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah gabungan data runtut waktu (*time series*) dan data antar individu (*cross section*) disebut dengan *pooled*, dalam ilmu ekonometrik hasil gabungan antar dua data tersebut disebut dengan *pooled data* atau panel data atau *longitudinal data*.

Penggunaan data panel menurut beberapa literatur mengandung beberapa kelebihan meskipun tidak lepas dari beberapa kelemahan. Adapun kelebihan yang dimiliki antara lain adalah *pertama*, semakin banyak jumlah observasi yang dimiliki maka akan semakin besar derajat kebebasan yang dimiliki (*degree of freedom*) serta akan menurunkan kolinearitas antar variabel bebas, kedua adanya kemungkinan untuk melakukan estimasi karakteristik masing-masing individu maupun karakteristik berdasarkan periode waktu secara terpisah, selain itu apabila diestimasi secara bersamaan data panel tersebut akan menghasilkan estimasi karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu dari masing-masing variabel bebasnya. Dengan demikian penggunaan data panel akan menghasilkan analisis yang komprehensif dan lebih mendekati kenyataannya.

Sementara kelemahan yang ditimbulkan dari penggunaan data panel (Pindyck dan Rubinfeld, 1995) adalah timbulnya beberapa gangguan (*disturbances* atau *error term*) antara lain gangguan antar waktu (*time series related disturbances*), gangguan antar individu (*cross section disturbances*) dan gangguan yang berasal dari keduanya.

Adapun model ekonometrik yang memasukkan variabel gangguan antar waktu dan antar individu adalah sebagai berikut: (Judge et al, 1985):

$$y_{it} = \beta_{0i} + \sum \beta_{ki} x_{kit} + \mu_{it} \quad \dots \dots \dots (4.9) \quad i = 1, 2, 3, \dots, N \quad \text{dan} \\ t = 1, 2, 3, \dots, T$$

Dimana i adalah unit *cross section*, t adalah waktu, y_{it} adalah variabel dependent pada individu i dan waktu t , X_{kit} adalah variabel non stokastik pada individu i dan waktu t , dan μ_{it} adalah variabel gangguan (*disturbance term*) yang diasumsikan memiliki rata-rata nol, $E[\mu_{it}] = 0$ dan variansi yang konstan, $E[\mu_{it}^2] = \sigma^2_{\mu}$.

Penggunaan analisa data panel dimaksudkan untuk mengakomodir perbedaan akibat adanya perbedaan individu dan waktu, dan untuk menggambarkan heterogenitas tersebut digunakan model dengan intercept yang berbeda. Diasumsikan bahwa perbedaan intercept yang terjadi berasal dari variabel yang tidak masuk dalam persamaan regresi yang dikenal dengan *omitted variable*. Pada persamaan 4.9 diatas, *omitted variable* dinyatakan dalam bentuk variabel gangguan (*disturbance term*).

Berdasarkan konsep dari adanya variabel gangguan, analisis data panel dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Model regresi dengan komponen error searah (*The One Way Error Component Regression Model*)
2. Model Regresi dengan komponen error dua arah (*The Two-way Error Component Regression Model*)

Dalam memilih sebuah model dalam data panel, terdapat 3 asumsi dasar, diantaranya yaitu:

1. *Individual time variant* yaitu model dengan *omitted variable* antar unit *cross section* tetapi konstan sepanjang observasi.
2. *Period individual-invariant* yaitu model dengan *omitted variable* yang berbeda antar waktu periode observasi, tetapi tidak melihat perbedaan diantara masing-masing unit *cross section*.
3. *Individual time-varying* yaitu model yang berbeda antar baik antar unit *cross section* maupun antar waktu observasi.

Berkaitan dengan efek individu yang terjadi, ada dua model dalam analisa data panel yang dapat digunakan, yaitu:

1. Model *Random Effect*

Yaitu model dimana μ_{it} tidak berkorelasi dengan X_{it} , biasanya model ini digunakan apabila unit *cross section*nya lebih cenderung bersifat populasi karena memiliki banyak parameter sehingga apabila semua parameter digunakan maka akan mengurangi derajat kebebasannya (*degree of freedom*). Hal ini dapat diatasi dengan cara mengasumsikan bahwa efek individu maupun efek waktu yang tidak diteliti (μ_i dan λ_t) digunakan secara random.

Pada model *random effect* ini efek individu maupun efek waktu yang tidak diteliti (μ_i dan λ_t) tidak memiliki hubungan dengan v_{it} dan semua komponen *disturbances term* (μ_i , λ_t dan v_{it}) tidak memiliki hubungan dengan X_{it} . Model ini kemudian dianalisis dengan menggunakan *Generalized Least Square* (GLS).

2. Model *Fixed Effect*

Yaitu model dimana efek individu maupun efek antar waktu yang tidak diteliti (μ_i dan λ_t) diasumsikan memiliki parameter yang tetap (*fixed*) sedangkan *disturbance* sisa (v_{it}) tidak memiliki hubungan terhadap X_{it} .

Estimator dalam model *fixed effect* merupakan estimator yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) selama *disturbances term* (u_{it}) memenuhi asumsi klasik standar dengan rata-rata nol dan matriks varians-kovarians $\sigma_u^2 I_{NT}$.

Untuk memilih model mana yang bisa digunakan, maka perlu dilakukan uji Hausman yaitu uji yang memperlihatkan bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dan tidak efisien adalah nol. Adapun rumus dari uji Hausman adalah sebagai berikut: (Johnson, Jack dan John D Nardo, 1997)

$$H = [\hat{\beta}_{re} - \hat{\beta}_{fe}] (\sum fe - \sum re)^{-1} [\hat{\beta}_{re} - \hat{\beta}_{fe}] \dots \dots \dots (4.8)$$

Keterangan:

H = Uji Hausman

$[\hat{\beta}_{re} - \hat{\beta}_{fe}]$ = Selisih antara matriks koefisien hasil estimasi dengan metode RE dikurangi matrix koefisien hasil estimasi FE yang hasilnya kemudian di transpose

$(\sum fe - \sum re)^{-1}$ = Selisih antar matriks kovarians variabel estimator dengan metode FE

$[\hat{\beta}_{re} - \hat{\beta}_{fe}]$ = Selisih antar matriks koefisien hasil estimasi dengan metode RE dikurangi matriks koefisien hasil estimasi FE

Uji hausman akan didistribusikan secara asiomatik sebagai χ^2 dengan k *degree of freedom* dengan hipotesa nol bahwa estimator *random effect* adalah benar.

Apabila nilai H hitung $> \chi^2$ maka H_0 ditolak atau model *fixed effect* lebih sesuai.

Apabila nilai H hitung $< \chi^2$ maka H_0 diterima atau model *random effect* lebih sesuai

4.4 Analisis Hasil Regresi

Dalam menjelaskan pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, dijelaskan oleh dua model:

1. Model pertumbuhan ekonomi dengan variabel bebas *Intergovernmental transfer* khususnya DAU dan DAK
2. Model pertumbuhan ekonomi dengan variabel bebas pendapatan asli daerah (PAD) dan indeks daya saing usaha (Idsu)

Model 1. Model pertumbuhan ekonomi dengan variabel bebas *Intergovernmental transfer* khususnya DAU dan DAK

Sebelum melakukan estimasi terhadap model 1, terlebih dahulu dilakukan pengujian Hausman untuk mengetahui model *fixed effect* atau *random effect* yang cocok digunakan untuk mengestimasi model 1. Adapun hasil dari Hausman Test bahwa χ^2 hitung lebih kecil dari χ^2 tabel dimana probabilitas $> \chi^2$ sebesar 0.1353, maka berdasarkan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan menerima hipotesis nol dengan demikian menerima model *random effect*.

Didalam model yang pertama dilakukan 3 kali estimasi dengan variabel yang berbeda pada masing-masing estimasi, maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Model Pertumbuhan Ekonomi dengan Variabel Bebas *Intergovernmental Transfer* khususnya DAU dan DAK

Variabel	Estimasi 1	Estimasi 2	Estimasi 3
Independent	Dependent		
	y		
_Cons	4.958 (0.229)**	4.959 (0.229)**	4.980 (0.227)**
DAU	0.120 (0.193)	0.121 (0.190)	-0.029 (0.104)
DAK	2.418 (1.010332)*	2.413 (0.970)*	2.936 (0.821)**
Pddk	-2.8e-07 (2.5e-07)	-2.8e-07 (2.3e-07)	-
Inv	0.018 (0.009)*	0.017 (0.007)**	0.010 (0.004)*
PAD	-0.007 (0.446)	-	-
Dsda	-0.2816 (0.457)	-0.278 (0.448)	-0.291 (0.446)
Prob>chi2	0.0000	0.0000	0.0000
N	1684	1684	1684

*menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 5% dan ** menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Angka dalam kurung menunjukkan *standart error*.

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari estimasi yang dilakukan ternyata DAK, investasi signifikan sehingga untuk model yang pertama didapat persamaan :

$$y = 4.980 + 2.936 \text{ DAK} + 0.010 \text{ Inv} \dots \dots \dots (4.9)$$

Berdasarkan estimasi model pertama menunjukkan bahwa uji signifikansi uji t, variabel DAU dan Dsda tidak signifikan terhadap y. Sementara berdasarkan uji signifikansi F test menunjukkan bahwa model signifikan, ini mengandung arti bahwa secara bersama-sama variabel *independent* dapat menjelaskan variabel *dependent*.

Model 2. Model pertumbuhan ekonomi dengan variabel bebas pendapatan asli daerah (PAD) dan indeks daya saing usaha

Sama seperti dalam model pertama, sebelum melakukan estimasi terhadap model 2, terlebih dahulu dilakukan pengujian Hausman untuk mengetahui model *fixed effect* atau *random effect* yang cocok digunakan untuk mengestimasi model

1. Adapun hasil dari Hausman Test bahwa χ^2 hitung lebih kecil dari χ^2 tabel probabilitas $> \chi^2$ sebesar 0.4768, maka berdasarkan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan menerima hipotesis nol dengan demikian menerima model *random effect*. Untuk mendapatkan model yang *robust* maka dilakukan beberapa estimasi dengan variabel bebas yang berbeda-beda, didapat hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Model Pertumbuhan Ekonomi dengan Variabel Bebas Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Indeks Daya Saing Usaha (Idsu)

Variabel	Estimasi 1	Estimasi 2
	Dependent	
Independent	y	
_Cons	5.024 (0.856)**	4.967 (0.084)**
PAD	0.958 (0.306)**	0.997 (0.321)**
Idsu	0.604 (4.124)	0.600 (4.106)
Pddk	-5.1e-07 (2.5e-07)*	-5.3e-07 (2.5e-07)*
Inv	0.013 (0.006)*	0.012 (0.006)*
Dsda	-0.305 (0.613)	.
Prob>chi2	0.0269	0.0179
N	392	392

*Menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 5% sedangkan **menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 1% sementara angka dalam kurung menunjukkan standar error.
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari estimasi yang dilakukan ternyata variabel PAD, investasi dan jumlah penduduk merupakan variabel yang signifikan dan estimasi kedua merupakan model yang memiliki nilai estimasi yang lebih baik sehingga untuk model kedua didapat persamaan :

$$y = 4.967 + 0.997 \text{ PAD} + 0.012 \text{ Inv} - 5.3e-07 \text{ Pddk} \dots\dots(4.10)$$

Berdasarkan hasil estimasi model dua menunjukkan bahwa uji signifikansi uji t, hanya variabel indeks daya saing usaha yang tidak signifikan terhadap y. Sementara berdasarkan uji signifikansi F test menunjukkan bahwa model yang kedua signifikan, ini mengandung arti bahwa secara bersama-sama variabel *independent* dapat menjelaskan variabel *dependent*.

Berdasarkan estimasi model 1 (persamaan 4.9) dan model 2 (persamaan 4.10), ternyata variabel investasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan estimasi model 3 untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap investasi dengan menjadikan investasi sebagai variabel *dependent*.

Namun dengan menjadikan variabel investasi di model 2 sebagai variabel eksogen dan di model 3 sebagai variabel endogen, diduga akan menimbulkan masalah *endogeneity* sehingga dilakukan *endogeneity test*. Hasil dari tes *endogeneity* menunjukkan bahwa probabilitas p-Value 0.534 yang berarti bahwa investasi merupakan variabel eksogen, jadi tidak terdapat masalah *endogeneity*. (lihat lampiran 5)

Dari hasil estimasi model 3 yaitu dengan menjadikan investasi sebagai variabel *dependent* sementara DAU, DAK dan indeks daya saing usaha sebagai variabel bebas didapat hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Model Investasi dengan DAU, DAK dan Indeks Daya Saing Usaha sebagai Variabel Bebas

Variabel	Estimasi 1	Estimasi 2
	Dependent	
Independent	I	
_Cons	-1.230 (1.035)	-2.716 (1.124)*
DAU	1.382 (0.506)*	1.424 (0.501)*
DAK	-26.147 (11.805)*	-
Idsu	10.675 (4.606)*	11.159 (4.669)*
Dsda	0.623 (1.283)	-
Prob>chi2	0.0021	0.0024
N	392	392

*Menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 5% sedangkan **menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 1% sementara angka dalam kurung menunjukkan standar error.

Sumber : Sumber: Hasil pengolahan data sekunder

Dari estimasi yang dilakukan ternyata variabel DAU, indeks daya saing usaha (Idsu) merupakan variabel yang signifikan dan estimasi kedua merupakan model yang memiliki nilai estimasi yang lebih baik sehingga untuk model ketiga didapat persamaan :

$$I = -2.716 + 1.424 \text{ DAU} + 11.159 \text{ Idsu} \dots\dots\dots(4.11)$$

Berdasarkan hasil estimasi model tiga menunjukkan bahwa uji signifikansi uji t, variabel DAK dan dummy SDA tidak signifikan terhadap Investasi. Sementara berdasarkan uji signifikansi F test menunjukkan bahwa model yang ketiga signifikan, ini mengandung arti bahwa secara bersama-sama variabel *independent* dapat menjelaskan variabel *dependent*.

4.4 Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi di kedua model, diketahui ternyata desentralisasi fiskal yang ditandai dengan adanya transfer terutama DAK dan adanya PAD ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2003-2007.

Adanya hubungan positif tersebut memperkuat studi yang dilakukan oleh Davoodi, Xie dan Zou (1995) di Amerika Serikat dan di Indonesia dilakukan oleh Pusporini (2005) pada tahun awal desentralisasi yaitu 2001-2003. Selain itu, hubungan positif antara DAK dan pertumbuhan ekonomi pada model pertama, mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian transfer dalam bentuk DAK telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dibandingkan dengan transfer dalam bentuk DAU.

Namun besarnya pengaruh dari DAK dan PAD tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masih kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari koefien yang dihasilkan oleh DAK, dimana setiap adanya tambahan DAK riil sebesar Rp 1 milyar maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 2.936 persen. Artinya adalah ketika pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten/kota sebesar 5 persen maka ketika ada tambahan DAK riil sebesar 1 milyar maka pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat sebesar 0.147 persen sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi 5,147 persen. Sementara untuk PAD, ketika ada tambahan PAD riil sebesar Rp 1 milyar maka akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,997 persen. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten/kota sebesar 5 persen maka ketika ada tambahan PAD riil sebesar Rp 1 milyar, akan ada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi 5,05 persen.

Kecilnya pengaruh DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebenarnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Davoodi, Xie dan Zou (1995) di Amerika Serikat dan di Indonesia dilakukan oleh Pusporini (2006).

Meskipun pengaruh DAK dan PAD masih kecil terhadap pertumbuhan ekonomi, namun apabila dibandingkan antara keduanya, ternyata pengaruh dari PAD lebih kecil dibandingkan dengan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi, kecilnya pengaruh PAD tersebut bisa jadi karena masih terbatasnya basis pajak dan retribusi daerah, mengingat adanya kriteria penetapan pajak baru yang tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat maupun propinsi sehingga PAD belum bisa diandalkan sebagai sumber utama pembangunan daerah. Selain itu, meskipun sudah ada aturan tidak boleh adanya tumpang tindih pajak daerah dengan pajak pusat maupun propinsi, tetapi masih ada benturan peraturan mengenai retribusi dan pajak antar pemerintah daerah dan pusat sehingga membuat daerah belum dapat memaksimalkan PADnya. Dan menurut Sidik dalam Pusporini (2006), kemampuan perencanaan dan pengawasan daerah yang rendah dalam hal pajak mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah sehingga menjadi kendala dalam penggalan dan peningkatan PAD.

Sementara untuk DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini bisa saja terjadi mengingat sebagian besar dari DAU sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota dipakai untuk gaji pegawai menyebabkan hanya sedikit sekali yang digunakan sebagai belanja modal.

Sementara indeks daya saing usaha menurut hasil estimasi pada model kedua tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Hal ini bisa saja terjadi karena ada sebagian daerah yang memiliki indeks daya saing usaha yang tidak begitu bagus tetapi daerahnya sudah berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga daya saing usaha yang tidak terlalu bagus pada masa desentralisasi fiskal tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sebaliknya bagi daerah

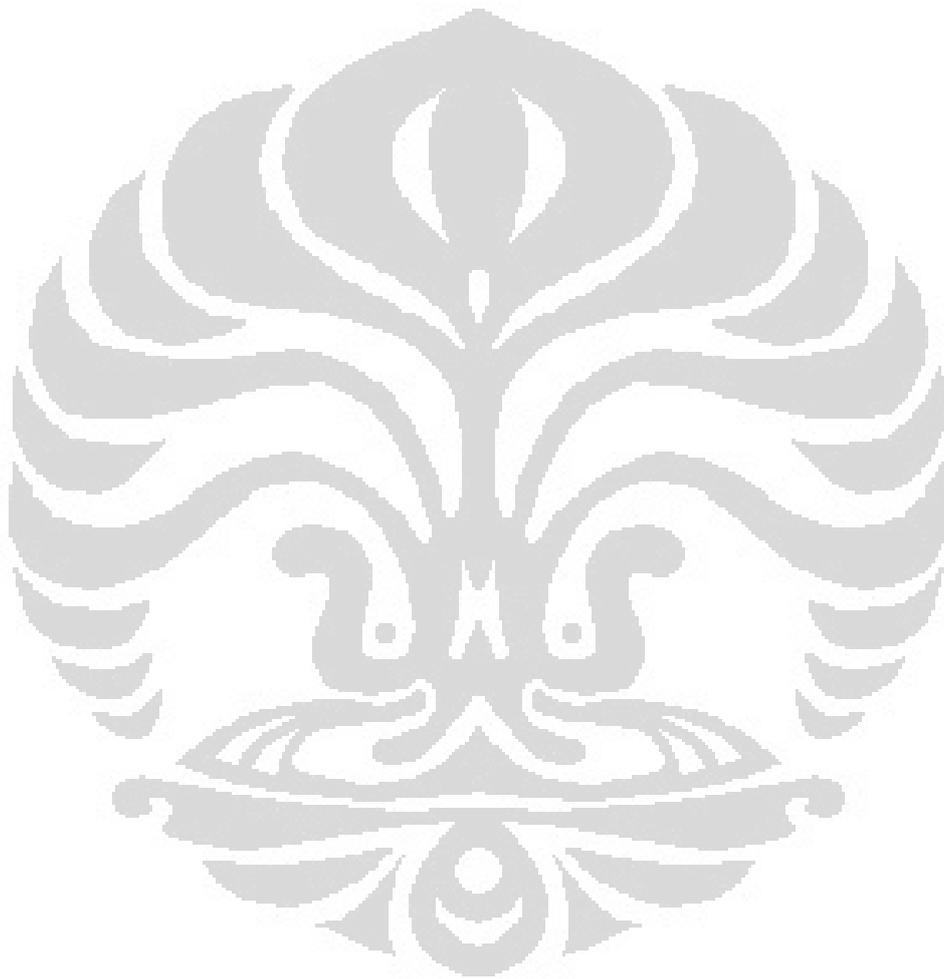
yang memiliki indeks daya saing usaha yang bagus pada era desentralisasi tetapi daerahnya belum berkembang (terutama infrastruktur yang belum begitu bagus) sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat dalam perhitungan indeks daya saing usaha, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur bukan merupakan faktor yang dibobot dengan nilai yang paling tinggi.

Hasil estimasi pada variabel kontrol pada model pertama dan kedua menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini sesuai dengan teori fungsi produksi yang menyatakan bahwa modal dalam bentuk investasi dapat menjadi input yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Begitu pun dengan jumlah penduduk di model yang kedua, menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, namun pengaruhnya negatif padahal seharusnya positif sesuai dengan teori produksi dimana manusia bersama dengan variabel lainnya dapat menjadi input. Pengaruh negatif jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terjadi karena sebagian dari mereka merupakan pengangguran dan usia tidak produktif sehingga semakin besar jumlah mereka maka akan mengurangi pertumbuhan ekonomi karena mereka tidak menghasilkan output tetapi memerlukan output untuk kelangsungan hidupnya.

Sementara hasil estimasi variabel dummy berdasarkan SDA yang dimiliki menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Tidak signifikannya variabel dummy tersebut memperlihatkan bahwa tidak adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten/kota yang memiliki SDA dan yang tidak memiliki SDA. Ini bisa terjadi karena banyak daerah di Indonesia yang meskipun tidak memiliki SDA yang melimpah, menjadikan perdagangan dan industri sebagai penggerak perekonomian daerahnya.

Berdasarkan estimasi model 1 dan model 2, ternyata variabel investasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ternyata berdasarkan model 3, investasi dipengaruhi oleh variabel DAU dan indeks daya saing usaha dimana setiap ada kenaikan DAU riil sebesar Rp 1 milyar maka akan meningkatkan investasi riil sebesar Rp 1,42 milyar dan

jika ada peningkatan indeks daya saing usaha sebesar 1 point maka akan meningkatkan investasi riil sebesar Rp 11,16 milyar.



Universitas Indonesia

BAB V KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan evaluasi dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan hampir 9 tahun dari tahun 2001 sampai dengan 2009. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan adanya *Intergovernmental transfer* yang tinggi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah khususnya DAU dan DAK serta adanya kebebasan daerah untuk memungut pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah (PAD)nya yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut juga disertai oleh pelimpahan kewenangan kewajiban dari pemerintah pusat ke daerah.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka di Indonesia selama kurun waktu 2003-2007 dapat disimpulkan bahwa:

1. DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sebagai unit pelaksana dari desentralisasi fiskal. Jadi disini ada konsistensi hubungan meskipun pengaruhnya masih kecil.
2. DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, tetapi variabel ini berpengaruh terhadap investasi di daerah.
3. Estimasi terhadap variabel kontrol yaitu investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Dan variabel investasi ini dipengaruhi oleh DAU dan indeks daya saing usaha. Sementara jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota disebabkan banyaknya yang tidak produktif baik karena pengangguran maupun usia yang tidak produktif.
4. Hasil estimasi pengaruh perbedaan wilayah baik yang memiliki sumber daya alam (SDA) maupun tidak memiliki SDA menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Dari hasil kesimpulan diatas maka diharapkan pemerintah pusat dapat meningkatkan *intergovernmental transfer* dalam bentuk DAK tanpa mengabaikan

transfer dalam bentuk DAU karena DAU ternyata berpengaruh terhadap investasi. Selain itu perlu ada sebuah kebijakan yang dapat menstimulus pemerintah daerah dalam meningkatkan PADnya tanpa mengganggu iklim investasi mengingat investasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga peningkatan daya saing usaha mutlak perlu dilakukan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak memasukkan dana bagi hasil dalam model
2. Memasukkan daerah-daerah setelah tahun 2003 yang mengalami pemekaran ke dalam daerah induknya.
3. Periode penelitian hanya sampai pada tahun 2007 untuk model 1 dan 2005 untuk model 2.

DAFTAR REFERENSI

- Akai, Nabuo, dan Masayo Sakata (2005), *Fiscal Decentralization, Commitment and Regionality: Evidence from State Level Cross Sectional Data for the United States*, DIRJE Discussion Paper, January
- Akai, N dan M. Sakata (2002), *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth : Evidence from State Level Cross Sectional Data for the United States*, Journal of Urban Economic Vol 52. hal 93-108
- Bappenas, (2008), *Perkembangan Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)*, Jakarta
- BPS, *Provinsi Dalam Angka*, Beberapa Edisi
- Brata, A.G dan Z Arifin (2003), *Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional Indonesia*, Media Ekonomi, 13 (20) hal. 59-71
- Davoodi, H dan H.Zou (1998), *Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study*, Journal of Urban Economic Vol 43. hal 244-57
- Departemen Keuangan, (2002), *Panduan Ringkas Formuladi DAU 2002*, di unduh dari [www. DJPKPD.go.id](http://www.DJPKPD.go.id)
- Departemen Keuangan (2007), *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Intergovernmental Fiscal Review*, di unduh dari www. DJPKPD.go.id
- Helpman, Elhanan and Grossman, Gene M, *Endogenous Innovation in The Theory of Growth*, The Journal of Economic Perspectives, Vol 8 No 1. (winter, 1994), hal. 23-44
- KPPOD, (2005), *Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Presepsi Dunia Usaha*, Jakarta
- Mindarti, L.I,(2002), *Transfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD dan Demokrasi Lokal*, diunduh dari www.baru%21teoritik-lely%201%20Mtransfer%20dana%20pusat.pdf
- Mulyadi, Rudy, (2005), *Peranan Pengehuan dan Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi di Indonesia Tahun 1991-1999*, Tesis Pascasarjana FE UI.
- Panggabean, Adrian dkk, (1999), *Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep dan Formula Alokasi*, di unduh dari www.konsep%20dan%20alokasi%20DAU.pdf

- Poesoro, Adri (2008), Mekanisme Penetapan Alokasi DAK, *SMERU* No. 25: Jan-Apr/2008
- Pusporini, Dewi (2005), *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal*, Tesis Pascasarjana FE UI. Jakarta
- Pratikno, 2002, *Keuangan Daerah: Manajemen dan Kebijakan*, MAP-UGM: Yogyakarta.
- Rosen, H.S, (2002), *Public Finance*, Edisi keenam, Mc-Graw Hill Book, Co. New York.
- Romer, David. 2006, *Advanced Macroeconomics*, New York: McGraw Hill.
- Romer, M Paul, 1994, *The Origin of Endogenous Growth*, *The Journal of Economic Perspectives*, Vol 8 No 1. (winter, 1994), hal. 3-22
- Solow, Robert M, 1994, *Perspectives on Growth Theory*, *The Journal of Economic Perspectives*, Vol 8 No 1. (winter, 1994), hal. 45-54
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004
- Wilde, J.A,(1986), "The Expenditure Effects of Grants in Aid Programs", *National Tax Journal*. 21 (3), September:340-348.
- Naganathan, M dan K.J Sivagnam, (1999), "Federal Transfers and Tax Effort of States in India", *Indian Economic Journal*, 47(4), April:101-110.
- Kuncoro, Haryo, (2007), *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi X pada 26-28 Juli 2007 di Makasar.
- Waluyo, Joko, (2007), *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*, Simposium 12 Desember 2007 di UI Depok.

Lampiran 1. Kabupaten/Kota di Indonesia yang jadi Unit Analisa

Tabel Kabupaten/Kota di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Aceh Barat	54	Kab. Kuantan Singingi	107	Kab. Majalengka	160	Kab. Jember
2	Kab. Aceh Besar	55	Kab. Natuna	108	Kab. Purwakarta	161	Kab. Jombang
3	Kab. Aceh Selatan	56	Kab. Pelelawan	109	Kab. Subang	162	Kab. Kediri
4	Kab. Aceh Singkil	57	Kab. Rokan Hilir	110	Kab. Sukabumi	163	Kab. Lamongan
5	Kab. Aceh Tengah	58	Kab. Rokan Hulu	111	Kab. Sumedang	164	Kab. Lumajang
6	Kab. Aceh Tenggara	59	Kab. Siak	112	Kab. Tasikmalaya	165	Kab. Mudran
7	Kab. Aceh Timur	60	Kota Batam	113	Kota Bandung	166	Kab. Magetan
8	Kab. Aceh Utara	61	Kota Dumai	114	Kota Bekasi	167	Kab. Malang
9	Kab. Bireun	62	Kota Pekanbaru	115	Kota Bogor	168	Kab. Mojokerto
10	Kab. Pidie	63	Kab. Sarolangun	116	Kota Cirebon	169	Kab. Nganjuk
11	Kab. Simeulue	64	Kab. Muaro Jambi	117	Kota Depok	170	Kab. Ngawi
12	Kota Banda Aceh	65	Kab. Tanjung Jabung Timur	118	Kota Sukabumi	171	Kab. Pacitan
13	Kota Sabang	66	Kab. Tebo	119	Kab. Banjarnegara	172	Kab. Pamekasan
14	Kab. Asahan	67	Kab. Batanghari	120	Kab. Banyumas	173	Kab. Pasuruan
15	Kab. Dairi	68	Kab. Kerinci	121	Kab. Batang	174	Kab. Ponorogo
16	Kab. Deli Serdang	69	Kab. Bungo	122	Kab. Blera	175	Kab. Probolinggo
17	Kab. Labuhan Batu	70	Kab. Merangin	123	Kab. Boyolali	176	Kab. Sampang
18	Kab. Langkat	71	Kab. Tanjung Jabung	124	Kab. Brebes	177	Kab. Sidoarjo
19	Kab. Mandailing Natal	72	Kota Jambi	125	Kab. Cilacap	178	Kab. Situbondo
20	Kab. Nias	73	Kab. Lahat	126	Kab. Demak	179	Kab. Sumenep
21	Kab. Simalungun	74	Kab. Muara Enim	127	Kab. Grobogan	180	Kab. Trenggalek
22	Kab. Tanah Karo	75	Kab. Musi Banyuasin	128	Kab. Jepara	181	Kab. Tuban
23	Kab. Tapanuli Selatan	76	Kab. Musi Rawas	129	Kab. Karanganyar	182	Kab. Tulungagung
24	Kab. Tapanuli Tengah	77	Kab. Ogan Komering Ilir	130	Kab. Kebumaha	183	Kota Blitar
25	Kab. Tapanuli Utara	78	Kab. Ogan Komering Ulu	131	Kab. Kendal	184	Kota Kediri
26	Kab. Toba Samosir	79	Kota Palembang	132	Kab. Kliten	185	Kota Madiun
27	Kota Binjai	80	Kab. Bangka	133	Kab. Kudus	186	Kota Malang
28	Kota Medan	81	Kab. Belitung	134	Kab. Magelang	187	Kota Mojokerto
29	Kota Pematang Siantar	82	Kota Pangkal Pinang	135	Kab. Pati	188	Kota Pasuruan
30	Kota Sibolga	83	Kab. Bengkulu Selatan	136	Kab. Pekalongan	189	Kota Probolinggo
31	Kota Tanjung Balai	84	Kab. Bengkulu Utara	137	Kab. Pematang	190	Kota Surabaya
32	Kota Tebing Tinggi	85	Kab. Rejang Lebong	138	Kab. Purbalingga	191	Kab. Lebak
33	Kab. Agam	86	Kota Bengkulu	139	Kab. Purworejo	192	Kab. Pandeglang
34	Kab. 50 Kota	87	Lampung Selatan	140	Kab. Rembang	193	Kab. Serang
35	Kab. Padang Pariaman	88	Kab. Lampung Tengah	141	Kab. Semarang	194	Kab. Tangerang
36	Kab. Pasaman	89	Kab. Lampung Utara	142	Kab. Sragen	195	Kota Tangerang
37	Kab. Pesisir Selatan	90	Kab. Lampung Barat	143	Kab. Sukoharjo	196	Kota Cilegon
38	Kab. Sawahlunto	91	Kab. Tulang Bawang	144	Kab. Tegal	197	Kab. Bantul

Lanjutan

39	Kab. Solok	92	Kab. Tanggamus	145	Kab. Temanggung	198	Kab. GunungKidul
40	Kab. Tanah Datar	93	Kab. Lampung Timur	146	Kab. Wonogiri	199	Kab. Kulon Progo
41	Kab. Kep Mentawai	94	Kab. Way Kanan	147	Kab. Wonosobo	200	Kab. Steman
42	Kota Bukit Tinggi	95	Kota Bandar Lampung	148	Kota Magelang	201	Kota Yogyakarta
43	Kota Padang	96	Kota Metro	149	Kota Pekalongan	202	DKI Jakarta
44	Kota Padang Panjang	97	Kab. Bandung	150	Kota Salatiga	203	Kab. Badung
45	Kota Payakumbuh	98	Kab. Bekasi	151	Kota Semarang	204	Kab. Bangli
46	Kota Sawahlunto	99	Kab. Bogor	152	Kota Surakarta	205	Kab. Bulcleng
47	Kota Solok	100	Kab. Ciamis	153	Kota Tegal	206	Kab. Gianyar
48	Kab. Bengkalis	101	Kab. Cianjur	154	Kab. Bangkalan	207	Kab. Jembrana
49	Kab. Indragiri Hilir	102	Kab. Cirebon	155	Kab. Banyuwangi	208	Kab. Karangasem
50	Kab. Indragiri Hulu	103	Kab. Garut	156	Kab. Blitar	209	Kab. Klungkung
51	Kab. Kampar	104	Kab. Indramayu	157	Kab. Bojonegoro	210	Kab. Tabanan
52	Kab. Karimun	105	Kab. Karawang	158	Kab. Bondowoso	211	Kota Denpasar
53	Kab. Riau Kepulauan	106	Kab. Kuningan	159	Kab. Gresik		



Lanjutan

No	Kabupaten/kota	No	Kabupaten/kota	No	Kabupaten/kota
212	Kab Lombok Barat	254	Kab Hulu Sungai Tengah	300	Kab Wajo
213	Kab Lombok Tengah	255	Kab Hulu Sungai Utara	301	Kab Sidenreng Rappang
214	Kab Lombok Timur	256	Kab Tabalong	302	Kab Pinrang
215	Kab Sumbawa	257	Kota Banjarmasin	303	Kab Enrekang
216	Kab Dompu	258	Kota Banjar Baru	304	Kab Luwu
217	Kota Mataram	259	Kab Pasir	305	Kab Tang Toraja
218	Kab Bima	260	Kab Kutai Barat	306	Kab Luwu Utara
219	Kab Sumba Barat	261	Kab Kutai Kertanegara	307	Kota Makassar
220	Kab Sumba Timur	262	Kab Kutai Timur	308	Kota Pare-Pare
221	Kab Kupang	263	Kab Berau	309	Kab Buton
222	Kab Timor Tengah Selatan	264	Kab Malinau	310	Kab Muna
223	Kab Timor Tengah Utara	265	Kab Bulungan	311	Kab Konawe
224	Kab Belu	266	Kab Nunukan	312	Kab Kolaka
225	Kab Alor	267	Kota Balikpapan	313	Kota Kendari
226	Kab Lembata	268	Kota Samarinda	314	Kab Boalemo
227	Kab Flores Timur	269	Kota Tarakan	315	Kab Gorontalo
228	Kab Sikka	270	Kota Bontang	316	Kota Gorontalo
229	Kab Ende	271	Kab Bolaang Mongondow	317	Kab Majene
230	Kab Ngada	272	Kab Minahasa	318	Kab Polewali Mandar
231	Kab Manggarai	273	Kab Kepulauan Sangihe	319	Kab Mamuju
232	Kota Kupang	274	Kota Manado	320	Kab Maluku Tenggara Barat
233	Kab Sumbawa	275	Kota Bitung	321	Kab Maluku Tenggara
234	Kab Bengkayang	276	Kab Banggai Kepulauan	322	Kab Maluku Tengah
235	Kab Landak	277	Kab Banggai	323	Kab Buru
236	Kab Pontianak	278	Kab Morowali	324	Kota Ambon
237	Kab Sanggau	279	Kab Poso	325	Kab Maluku Utara
238	Kab Ketapang	280	Kab Donggala	326	Kab Halmahera Tengah
239	Kab Sintang	281	Kab Toli-Toli	327	Kota Ternate
240	Kab Kapuas Hulu	282	Kab Buol	328	Kab Merauke
241	Kota Pontianak	283	Kota Palu	329	Kab Jayawijaya
242	Kab Kotawaringin Barat	284	Kab Selayar	330	Kab Jayapura
243	Kab Kotawaringin Timur	285	Kab Bulukumba	331	Kab Nabire
244	Kab Kapuas	286	Kab Bantaeng	332	Kab Yapen Waropen
245	Kab Barito Selatan	287	Kab Jeneponto	333	Kab Biak Numfor
246	Kab Barito Utara	288	Kab Takalar	334	Kab Panai
247	Kota Palangka Raya	289	Kab Gowa	335	Kab Puncak Jaya
248	Kab Tanah Laut	290	Kab Sinjai	336	Kab Mimika
249	Kab Kota Baru	291	Kab Maros	337	Kota Jayapura
250	Kab Banjar	292	Kab Pangkajene Kepulauan		
251	Kab Barito Kuala	293	Kab Barru		
252	Kab Tapin	294	Kab Bone		
253	Kab Hulu Sungai Selatan	295	Kab Soppeng		

Lampiran 2. Hausman Test Model 1 dan Model 2

Hausman Test Model 1

Fixed Versus Random Effec	
	$\text{chi2}(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$
=	8.40
Prob>chi2=	0.1353
	(V_b-V_B is not positive definite)

Hausman Test Model 2

Fixed Versus Random Effec	
$\text{chi2}(2)$	$= (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$
=	1.48
Prob>chi2 =	0.4768
	(V_b-V_B is not positive definite)

Lampiran 3. Hasil Regresi Model 1

Model 1. (Unit Analisa 337 kabupaten/kota tahun 2003-2007)

xtreg y DAU DAK Pddk Inv PAD Dsda, re robust

Random-effects GLS regression Number of obs = 1685
 Group variable: i Number of groups = 337

R-sq: within = 0.0036 Obs per group: min = 5
 between = 0.0205 avg = 5.0
 overall = 0.0078 max = 5

Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(7) = 4229.56
 corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000

(Std. Err. adjusted for clustering on i)

y	Coef.	Std. Err.	Robust z	P> z	[95% Conf. Interval]	
DAU	.1196032	.1932043	0.62	0.536	-.2590704	.4982767
DAK	2.417889	.9754437	2.48	0.013	.506055	4.329724
Pddk	-2.82e-07	2.52e-07	-1.12	0.264	-7.76e-07	2.13e-07
Inv	.018429	.0091512	2.01	0.044	.0004929	.036365
PAD	-.0073813	.0445757	-0.17	0.868	-.094748	.0799854
Dsda	-.2815985	.4557448	-0.62	0.537	-1.174842	.6116449
_cons	4.958085	.2288783	21.66	0.000	4.509492	5.406678
sigma_u	1.1376074					
sigma_e	4.2532116					
rho	.066764 (fraction of variance due to u_i)					

Keterangan:

- DAU = DAU Riil
- DAK = DAK Riil
- Pddk = Jumlah Penduduk
- Inv = Investasi Riil
- y = Pertumbuhan Ekonomi
- PAD = PAD Riil
- Dsda = Dummy wilayah kaya SDA, dimana wilayah kaya SDA minyak dan gas= 1 dan wilayah tidak memiliki SDA minyak dan gas=0

Model 1. (Unit Analisa 337 kabupaten/kota tahun 2003-2007)

```
. xtreg y DAU DAK Pddk Inv Dsda, re robust
```

```
Random-effects GLS regression           Number of obs   =   1685
Group variable: i                       Number of groups =   337

R-sq:  within = 0.0036                   Obs per group:  min =    5
        between = 0.0204                  avg   =    5.0
        overall = 0.0078                  max   =    5

Random effects u_i ~ Gaussian           Wald chi2(6)    =  4125.21
corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Prob > chi2    =  0.0000
```

(Std. Err. adjusted for clustering on i)

y	Coef.	Std. Err.	Robust z	P> z	[95% Conf. Interval]	
DAU	.1212617	.1899276	0.64	0.523	-.2509896	.493513
DAK	2.412721	.9704556	2.49	0.013	.5106626	4.314779
Pddk	-2.88e-07	2.34e-07	-1.23	0.217	-7.47e-07	1.70e-07
Inv	.0174002	.0066265	2.63	0.009	.0044126	.0303879
Dsda	-.278341	.4475067	-0.62	0.534	-1.155438	.5987559
_cons	4.958939	.2286379	21.69	0.000	4.510817	5.407061

sigma_u	1.1343737					
sigma_e	4.2520084					
rho	.06644524	(fraction of variance due to u_i)				

Keterangan:

DAU = DAU Riil
 DAK = DAK Riil
 Pddk = Jumlah Penduduk
 Inv = Investasi Riil
 y = Pertumbuhan Ekonomi
 Dsda = Dummy wilayah kaya SDA, dimana wilayah kaya SDA minyak dan gas= 1 dan wilayah tidak memiliki SDA minyak dan gas=0

Model 1. (Unit Analisa 337 kabupaten/kota tahun 2003-2007)

```
reg y DAU DAK Inv Dsda, re robust
```

```
Random-effects GLS regression      Number of obs   =    1685
Group variable: i                  Number of groups =    337
```

```
R-sq:  within = 0.0037              Obs per group:  min =     5
      between = 0.0175                avg   =    5.0
      overall = 0.0070                max   =     5
```

```
Random effects u_i ~ Gaussian      Wald chi2(5)    =   2717.35
corr(u_i, X) = 0 (assumed)         Prob > chi2     =    0.0000
```

(Std. Err. adjusted for clustering on i)

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
DAU	-.0287153	.1043662	-0.28	0.783	-.2332694	.1758387
DAK	2.936299	.821234	3.58	0.000	1.32671	4.545888
Inv	.0103103	.0041701	2.47	0.013	.0021371	.0184834
Dsda	-.2910206	.4459202	-0.65	0.514	-1.165008	.5829669
_cons	4.980128	.226785	21.96	0.000	4.535638	5.424619
sigma_u	1.1318398					
sigma_e	4.2538162					
rho	.06611584	(fraction of variance due to u_i)				

Keterangan:

DAU = DAU Riil

DAK = DAK Riil

Inv = Investasi Riil

y = Pertumbuhan Ekonomi

Dsda = Dummy wilayah kaya SDA, dimana wilayah kaya SDA minyak dan gas= 1 dan wilayah tidak memiliki SDA minyak dan gas=0

Model 3 (Unit Analisa 131 kabupaten/kota tahun 2003-2005)

```
. xtreg Inv DAU Idsu, re robust
```

```
Random-effects GLS regression           Number of obs   =       393
Group variable: i                       Number of groups =       131
```

```
R-sq:  within = 0.0079                   Obs per group:  min =        3
        between = 0.0717                  avg   =       3.0
        overall = 0.0250                  max   =        3
```

```
Random effects u_i ~ Gaussian           Wald chi2(3)    =       14.40
corr(u_i, X) = 0 (assumed)             Prob > chi2     =       0.0024
```

(Std. Err. adjusted for clustering on i)

Inv	Coef.	Std. Err.	Robust z	P> z	[95% Conf. Interval]	
DAU	1.423912	.5010445	2.84	0.004	.4418824	2.405941
Idsu	11.15882	4.668775	2.39	0.017	2.008193	20.30946
_cons	-2.715909	1.12406	-2.42	0.016	-4.919026	-.5127909

```
-----
sigma_u | 3.8477245
sigma_e | 6.8826567
rho | .23811432 (fraction of variance due to u_i)
-----
```

Keterrangan:

DAU = Dana Alokasi Umum Riil
 Inv = Investasi Riil
 Idsu = Indeks Daya Saing Usaha

Lampiran 6. Hasil endogeneity test

Hasil endogeneity test

ivreg2 x5 x7 x9 x3 x10 (x4=x1 x2)

IV (2SLS) estimation

Estimates efficient for homoskedasticity only
 Statistics consistent for homoskedasticity only

		Number of obs =	392
		F(5, 386) =	1.41
		Prob > F =	0.2208
Total (centered) SS =	3213.444919	Centered R2 =	-0.0099
Total (uncentered) SS =	12981.52219	Uncentered R2 =	0.7500
Residual SS =	3245.347788	Root MSE =	2.877

x5	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
x4	-.051463	.1047305	-0.49	0.623	-.2567311 .1538051
x7	1.132746	.4864525	2.33	0.020	.1793163 2.086175
x9	-1.820245	3.815877	-0.48	0.633	-9.299227 5.658738
x3	=3.52e-07	4.18e-07	-0.84	0.399	-1.17e-06 4.67e-07
x10	-.2672489	.3623393	-0.74	0.461	-.9774208 .442923
_cons	5.453878	.8375908	6.51	0.000	3.81223 7.095525

Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):
 14.117
 Chi-sq(2) P-val = 0.0009

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):
 7.191
 Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size
 19.93
 15% maximal IV size
 11.59
 20% maximal IV size
 8.75
 25% maximal IV size
 7.25
 Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.

Sargan statistic (overidentification test of all instruments):
 0.016
 Chi-sq(1) P-val = 0.8993

Instrumented: x4
 Included instruments: x7 x9 x3 x10
 Excluded instruments: x1 x2

. ivendog

Tests of endogeneity of: x4

H0: Regressor is exogenous

Wu-Hausman F test: 0.38726 F(1,385) P-value = 0.53411

Durbin-Wu-Hausman chi-sq tes 0.39390 Chi-sq(1) P-value = 0.53025

Kesimpula: tidak terdapat masalah endogeneity, jadi varaibel investasi (x4) merupakan variable eksogen

